

Memahami defisit kesempatan kerja produktif dan menetapkan target

Panduan metodologi

Sektor Ketenagakerjaan

ILO Jenewa

Berdasarkan pada target MDG baru untuk mencapai lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak sepenuhnya untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, panduan singkat ini menguraikan konsep-konsep lapangan kerja produktif dan antonimnya, defisit lapangan kerja produktif. Panduan ini memberikan pedoman untuk memperkirakan defisit lapangan kerja produktif yang ada sekarang dan di masa lalu serta bagaimana menetapkan target-target untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang dapat digunakan untuk menentukan target penciptaan lapangan kerja produktif. Target-target tersebut, pada gilirannya, dapat digunakan untuk menjadi landasan informasi bagi kebijakan ekonomi dan sosial serta untuk menilai koherensi kebijakan dari perspektif untuk mencapai lapangan kerja produktif untuk semua dan menurunkan kemiskinan.

Daftar Isi

Prakata (<u>akan ditambahkan</u>).....	5
Ucapan Terima Kasih	6
1. Latar belakang dan justifikasi	7
2. Konsep dan Definisi.....	10
2.1Beberapa implikasi dari definisi pekerja miskin dan kesempatan kerja produktif	12
2.2Catatan mengenai migrasi tenaga kerja	14
3. Pendekatan Metodologi	16
4. Memperkirakan defisit kesempatan kerja produktif dan memproyeksikan kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja produktif – Langkah demi langkah	20
4.1Metode yang lebih disukai dengan menggunakan data mikro dari survei rumah tangga: kasus Bangladesh	20
4.1.1 Perhitungan defisit kesempatan kerja produktif masa lalu dan masa sekarang...	20
4.1.2 Untuk memperoleh perkiraan dan target berdasarkan target kemiskinan dan pengangguran	25
<u>Interpretasi hasil</u>	28
4.2Metode yang disederhanakan: Kasus Maluku, Indonesia	30
<u>Data yang diperlukan</u>	31
<u>Metodologi langkah per langkah</u>	32
<u>Interpretasi hasil</u>	36
<u>Data yang diperlukan untuk satu atau beberapa tahun sebelumnya</u>	37
<u>Interpretasi hasil</u>	38
4.3Pengenalan terhadap perangkat lunak berbasis excel	40
5. Meningkatkan level analisis.....	42
5.1Memasukkan penyebab kemiskinan lainnya kedalam model	42
5.1.1 Pengangguran dan kemiskinan	44
5.1.2 Menanggapi tingkat partisipasi yang rendah dalam angkatan kerja.....	44
5.1.3 Kekurangan sumber daya manusia (tenaga kerja)	44
Bosnia & Herzegovina: kebutuhan untuk menanggapi persoalan pekerja miskin, pengangguran dan partisipasi angkatan kerja perempuan	46
5.2Menanggapi tujuan ganda menurunkan kemiskinan dan pengangguran	49
6. Menyesuaikan kebutuhan atas kesempatan kerja produktif dengan penawaran: Sebuah fokus dalam perekonomian	52
Daftar Pustaka.....	58
Lampiran: Pekerja miskin berdasarkan negara (KILM)	59

Daftar Tabel

Tabel 1 Keterkaitan antara klasifikasi kemiskinan dan angkatan kerja	10
Tabel 2 Pekerja miskin aktual versus perkiraan pekerja miskin berbasis makro di negara-negara terpilih di Afrika Sub-Sahara	18
Tabel 3 Karakteristik angkatan kerja di Bangladesh, 2005	22
Tabel 4 Struktur angkatan kerja di Bangladesh, 2005	22
Tabel 5 Struktur angkatan kerja di Bangladesh, 2000	23
Tabel 6 Perubahan dalam angkatan kerja antara tahun 2000-2005, Bangladesh.....	23
Tabel 7 Perkiraan angkatan kerja – Bangladesh, 2015	27
Tabel 8 Perkiraan kebutuhan atas kesempatan kerja produktif – Bangladesh, 2005-2015 (dalam 000)	28
Tabel 9 Karakteristik angkatan kerja– Maluku, 2010.....	32
Tabel 10 Perkiraan angkatan kerja – Maluku, 2015	34
Tabel 11 Proyeksi perubahan dalam angkatan kerja– Maluku, 2010-2015.....	35
Tabel 12 Perkiraan kebutuhan atas kesempatan kerja produktif - Maluku 2010-2015	36
Tabel 13 Karakteristik angkatan kerja– Maluku (dalam 000)	37
Tabel 14 Klasifikasi angkatan kerja dan kemiskinan di BiH, 2007.....	46
Tabel 15 Distribusi dan proporsi rumah tangga menurut status kemiskinan mereka berdasarkan status aktivitas dari kepala rumah tangga, 2007. Persentase	47
Tabel 16 Partisipasi dalam angkatan kerja berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di BiH, 2007.....	47
Tabel 17 Angkatan kerja dan penduduk miskin berdasarkan sektor dan status bursa kerja, 2009. Persentase.....	50
Tabel 18 Kontribusi sektor ke PDB dan kesempatan kerja, Maluku, Indonesia. Persentase ..	54
Tabel 19 kontribusi sektor ke pertumbuhan dalam PDB dan kesempatan kerja, Maluku, Indonesia. Persentase	55
Tabel 20 Pertumbuhan produktivitas dan elastisitas kesempatan kerja berdasarkan sektor, Maluku, Indonesia. Persentase.....	56

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur angkatan kerja dari perspektif kemiskinan	12
Gambar 2 Struktur penduduk usia kerja	25
Gambar 3 Struktur defisit kesempatan kerja pproduktif (sebagai % dari angkatan kerja)	25
Gambat 4 Pekerjaan produktif yang diciptakan dan perkiraan kebutuhan untuk pekerjaan produktif.....	29
Gambar 5 Target ketenagakerjaan diuraikan (dalam 000).....	30
Gambar 6 Target ketenagakerjaan diuraikan berdasarkan jenis kelamin (dalam 000).....	30
Gambar 7 Target ketenagakerjaan diuraikan (dalam 000).....	38
Gambar 8 Defisit kesempatan kerja produktif, Maluku (in 000).....	39
Gambar 9 Penyebab kemiskinan dari perspektif ketenagakerjaan	45
Gambar 10 Partisipasi penduduk usia kerja dalam bursa kerja berdasarkan tingkat pendidikan (% dari WAP, 2007)	48
Gambar 11 Distribusi rumah tangga miskin berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, 2007.....	51
Gambar 12 Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan,.....	51
Gambar 13 PDB Provinsi dan indeks pertumbuhan kesempatan kerja, Maluku, Indonesia. 2002-2010 (2002=100)	54

Prakata (akan ditambahkan)

Ucapan Terima Kasih

Panduan ini dikembangkan oleh Per Ronnås, Miranda Kwong dan Leyla Shamchiyeva. Upaya ini memperoleh manfaat dari komentar-komentar membangun yang diberikan oleh sejumlah besar kolega ILO, baik di kantor pusat dan di lapangan. Panduan ini dikembangkan dalam kerangka kerja proyek mengenai *mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja* yang didanai dengan dermawan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia atau *Swedish International Development Cooperation Agency* (Sida) sebagai bagian dari kemitraan ILO-Sida.

1. Latar belakang dan justifikasi

Deklarasi Millennium diadopsi pada tahun 2000 mewakili upaya global yang paling meluas untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Disahkan oleh sekitar 189 negara, deklarasi ini menetapkan delapan sasaran untuk mencapai tujuan akhir ini, yang masing-masing dioperasionisasikan kedalam sejumlah target untuk dicapai pada tahun 2015. Sasaran Pembangunan Milenium pertama (MDG) adalah *Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem*. Awalnya, dua target untuk tahun 2015 ditetapkan guna mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan ini:

- *MDG Target 1.A – Untuk menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang memiliki penghasilan kurang dari 1 dolar Amerika per hari, antara tahun 1990-2015;*
- *MDG Target 1.C – Untuk menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita karena kelaparan, antara tahun 1990 and 2015.*

Mengenali pentingnya lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sebuah target ketiga untuk tujuan ini ditambahkan pada tahun 2007:

Target MDG baru 1.B – Untuk mencapai lapangan kerja produktif yang sepenuhnya dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk untuk perempuan dan kaum muda.

Sejalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan milenium, sebagian besar negara-negara berkembang telah mengadopsi target-target untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan menempatkan target ini pada inti dari strategi dan rencana pembangunan mereka. Negara-negara maju serta organisasi internasional juga telah berkomitmen dalam Deklarasi Milenium untuk membantu negara-negara berkembang dalam upayanya guna mencapai target-target dan tujuan-tujuan ini.

Pentingnya lapangan kerja produktif sebagai sebuah tujuan kebijakan kunci, terutama karena dunia sedang bangkit dari krisis ekonomi global yang berat, diakui dengan jelas oleh pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja di seluruh dunia dengan pengadopsian Pakta Lapangan Kerja Global pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada tahun 2009. Deklarasi bersama dari Pakta Lapangan Kerja Global meliputi sebuah komitmen “untuk menetapkan tujuan lapangan kerja yang produktif dan sepenuhnya serta pekerjaan yang layak di tengah-tengah upaya menanggapi krisis”.

Ketiga target yang mendasari tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem sangatlah terkait satu sama lain. Target-target untuk menurunkan proporsi penduduk yang hidup kurang dari satu dolar amerika per harinya menjadi setengahnya dan target untuk menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada dasarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Target lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak ini penting karena menunjukkan kendaraan utama dalam mencapai tujuan

pengentasan kemiskinan dan kelaparan serta dalam menanggapi aspek-aspek perampasan lainnya, seperti hak bermartabat. Upaya dalam mewujudkan lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak diakui sebagai prasyarat dalam mengentaskan kemiskinan serta cara yang paling penting untuk mencapai tujuan ini bersama dengan perlindungan sosial.

Target MDG baru ini “*untuk mewujudkan lapangan kerja produktif yang sepenuhnya dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda*” memiliki empat indikator, yang khususnya dan secara langsung terkait dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan.¹ Indikator-indikator ini meliputi:

1. Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (PDB per orang yang bekerja).
2. Rasio kesempatan kerja-terhadap-penduduk.
3. Proporsi penduduk yang bekerja namun hidup dibawah garis kemiskinan (tingkat pekerja miskin/ *working poverty rate*)
4. Proporsi pekerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga dalam total kesempatan kerja (tingkat kesempatan kerja rentan).

Indikator-indikator ketenagakerjaan ini dirancang untuk²:

- menyediakan pengukuran terhadap kemajuan pencapaian target baru *Millennium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium) yang relevan dan kuat;
- bersifat jelas dan lugas dalam menerjemahkan dan menyediakan basis bagi perbandingan internasional;
- bersifat relevan dan terkait dengan sistem pemantauan nasional;
- berdasarkan pada standar-standar internasional ILO, rekomendasi dan praktik-praktik terbaik dalam statistik, informasi dan analisis ketenagakerjaan;
- dibangun dari sumber-sumber data yang baik, yang memungkinkan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu.

Indikator terkait dengan konsep *pekerja miskin (working poor)* menyediakan keterkaitan langsung dan dapat dihitung antara kesempatan kerja dan kemiskinan penghasilan. Konsep ini khususnya bermanfaat karena konsep ini menawarkan sebuah alat untuk memperkuat analisis dan pemahaman kita terhadap keterkaitan pertumbuhan-kesempatan kerja-kemiskinan dalam kondisi negara yang berbeda-beda.

Berdasarkan pada konsep ini, panduan ini menguraikan bagaimana target-target yang ada untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dapat digunakan guna menentukan target penciptaan lapangan kerja produktif serta untuk memantau, menilai dan memperkirakan kemajuan pencapaian tujuan lapangan kerja produktif untuk semua. Kelompok sasaran utama dari panduan ini adalah konstituen ILO, staf ILO serta para praktisi lainnya. Tujuan utama

¹ *Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators* (Jenewa: ILO, 2009).

² Analisis konseptual dan empiris yang rinci atas keempat indikator dalam konteks Sub-Sahara Afrika diberikan dalam Theo Sparreboom and Alana Albee (eds.), *Towards Decent Work in Sub-Saharan Africa: Monitoring MDG Employment Indicators* (Jenewa: ILO, 2011).

dari panduan ini adalah untuk menghasilkan panduan yang mudah untuk digunakan, yang tidak terlalu sederhana maupun tidak terlalu bersifat teknis. Cakupan dari panduan ini jelas sekali terbatas. Fokusnya hanya pada lapangan kerja produktif, seperti didefinisikan oleh ILO dan pada bentuk-bentuk utama dari defisit kesempatan kerja produktif; pekerja miskin dan pengangguran. Namun, di banyak situasi, target-target lapangan kerja produktif perlu dilengkapi dengan target-target ketenagakerjaan lainnya, seperti penurunan pengangguran kaum muda atau pekerjaan yang rentan atau peningkatan tingkat kesempatan kerja. Situasi ekonomi, politik dan bursa kerja khusus dalam tiap kasus akan menentukan target-target apa yang paling relevan. Selain itu, fokusnya adalah pada perkiraan dan proyeksi. Oleh karena itu, panduan ini tidak menjelaskan bagaimana melakukan analisis bursa kerja yang komprehensif atau bagaimana melakukan analisis diagnostik ketenagakerjaan, dimana alat-alat lain tersedia untuk melakukan analisis tersebut.

2. Konsep dan Definisi

Definisi lapangan kerja produktif dan lawannya – pekerja miskin dan pengangguran – menjadikan keterkaitan antara lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak di satu sisi dan pengentasan kemiskinan di sisi lain secara sangat eksplisit.

Pekerja miskin didefinisikan sebagai orang yang bekerja³ dimana penghasilannya tidak memadai untuk mengangkat diri mereka dan tanggungannya keluar dari kemiskinan.⁴ Hal ini karena imbal balik (penghasilan) atas kerja yang mereka lakukan terlalu rendah (yang biasanya dihubungkan dengan tingkat produktivitas yang rendah) dan/atau karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang cukup banyak dan ingin bekerja lebih banyak lagi.

Lapangan kerja produktif, sebaliknya, didefinisikan sebagai kesempatan kerja yang menghasilkan imbal balik yang memadai kepada pekerja guna memungkinkan tingkat konsumsi pekerja dan tanggungannya di atas garis kemiskinan.

Defisit kesempatan kerja produktif terdiri dari mereka yang berada dalam angkatan kerja namun tidak memiliki lapangan kerja produktif. Hal ini memiliki dua bentuk: pekerja miskin dan pengangguran. Bersama dengan mereka yang bekerja secara produktif, mereka merupakan total angkatan kerja.

Pentingnya fokus pada defisit kesempatan kerja produktif adalah bahwa banyak negara maju juga menghadapi defisit kesempatan kerja produktif yang serius dalam bentuk tingginya tingkat pengangguran dan juga, tingginya tingkat pengangguran kaum muda. Di negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang maju, kurangnya lapangan kerja produktif cenderung mengambil bentuk pengangguran daripada pekerja miskin. Kedua-duanya merupakan bentuk dari kurangnya lapangan kerja produktif, walaupun respon terhadap mereka yang terkena dampaknya bergantung pada kondisi ekonomi dan faktor-faktor kelembagaan.

Tabel 1 dan **Gambar 1** dibawah ini menunjukkan bagaimana kemiskinan dan status angkatan kerja secara bersama-sama mendefinisikan pekerja miskin dan pekerja produktif.

Tabel 1 Keterkaitan antara klasifikasi kemiskinan dan angkatan kerja

Klasifikasi kemiskinan	Klasifikasi angkatan kerja	
	Pekerja	Pengangguran
Miskin	Pekerja miskin	Pengangguran, miskin
Tidak miskin	Pekerja produktif	Pengangguran, tidak miskin

³ Mereka yang bekerja mencakup semua yang bekerja untuk upah dan mereka yang berusaha sendiri atau sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Mereka yang bekerja meliputi penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Beberapa definisi nasional mengenai penduduk usia kerja juga mencakup batas usia atas, dimana ini harus diterapkan.

⁴ *Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators* (Jenewa: ILO, 2009).

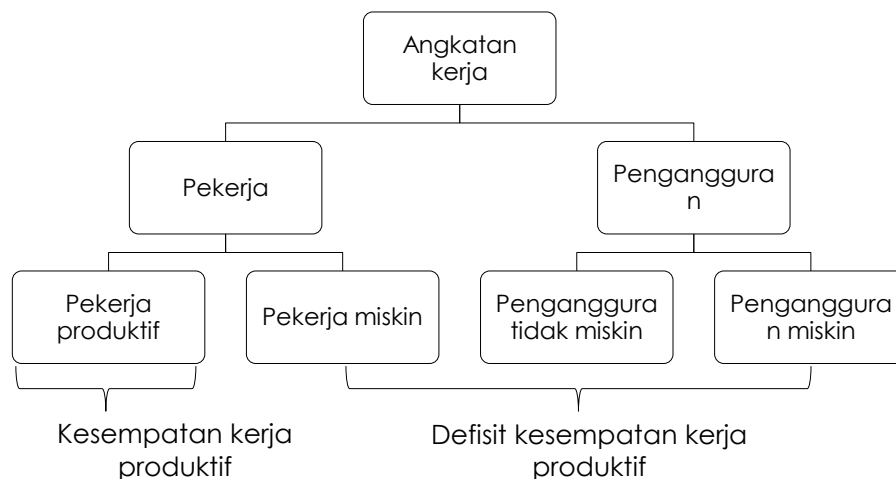
Sementara penurunan kemiskinan ekonomi yang ditetapkan sebagai target utama dalam strategi dan kemajuan pembangunan nasional terkait dengan pengentasan kemiskinan diukur dan dipantau secara rutin, namun lapangan kerja produktif dan kerja yang layak belum mencapai tingkat operasionalisasi yang sama menonjolnya dalam strategi pembangunan di banyak negara.⁵ Dalam konteks ini, relasi yang erat dan terdefinisikan dengan jelas antara dua tujuan pengentasan kemiskinan dan penempatan kesempatan kerja menjadi inti dari strategi pembangunan, memungkinkan untuk menarik target untuk lapangan kerja produktif dari target pengentasan kemiskinan yang sudah ditetapkan. Target-target yang ditujukan untuk mengurangi defisit kesempatan kerja produktif, baik dalam bentuk pekerja miskin dan pengangguran, seringkali mungkin lebih relevan daripada target-target yang berfokus hanya pada pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja terlepas dari tingkat produktivitas dan penghasilannya.

Setidaknya ada tiga keunggulan utama dari penetapan target-target semacam ini. Pertama, ini membantu dalam menjembatani kesenjangan antara apa yang perlu dicapai dan bagaimana hal tersebut bisa dicapai. Kedua, ini menempatkan kesempatan kerja sebagai fokus pembuatan kebijakan, karena pengukuran target-target ketenagakerjaan merupakan prasyarat untuk menempatkan target-target tersebut pada inti dari perencanaan pembangunan. Ketiga, ini dapat membantu memperjelas persoalan koherensi kebijakan, atau kurangnya koherensi kebijakan, antara target-target kemiskinan dan kesempatan kerja di satu sisi dan kebijakan serta target ekonomi di sisi lain.

Dibawah ini adalah sebuah presentasi dan pembahasan konsep lapangan kerja produktif dan metode yang mudah digunakan untuk menentukan target-target kuantitatif untuk lapangan kerja produktif dari target-target kemiskinan dan pengangguran yang ada.

⁵ Sebuah tinjauan terhadap PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers/ Makalah Strategi Penurunan Kemiskinan) di negara-negara Sub-Sahara Afrika telah menunjukkan bahwa walaupun aspek ketenagakerjaan kualitatif semakin ditunjukkan dalam PRSP, indikator-indikator ketenagakerjaan kuantitatif masih lemah. Tingkat pengangguran seringkali digunakan sebagai indikator utama walaupun kegunaannya terbatas dalam situasi-situasi dimana kaum miskin kekurangan akses ke perlindungan sosial dan bergantung seluruhnya pada pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Gambar 1 Struktur angkatan kerja dari perspektif kemiskinan



2.1 Beberapa implikasi dari definisi pekerja miskin dan kesempatan kerja produktif

Definisi dari pekerja miskin sebagai pekerja yang hidup dalam sebuah rumah tangga dimana anggotanya memiliki tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan yang sudah ditetapkan⁶, dan, sebagai akibatnya, definisi dari pekerja produktif yaitu pekerja yang hidup dalam rumah tangga yang anggotanya menikmati tingkat konsumsi di atas garis kemiskinan memiliki sejumlah implikasi.

Definisi ini menyiratkan bahwa apakah pekerja itu dikategorikan sebagai pekerja produktif ataupun pekerja miskin bergantung pada:

- Penghasilan, baik dalam bentuk uang tunai dan barang, dari kerja yang dilakukannya;
- Rasio ketergantungan intra-rumah tangga, yaitu jumlah orang yang harus diberi makan oleh tiap pencari nafkah;
- Penghasilan dari kerja yang dimiliki oleh anggota rumah tangga lain yang bekerja, dan;
- Penghasilan lain yang tidak terkait dengan kerja yang dilakukan, seperti bantuan tunai dari pemerintah atau swasta.

Rasio ketergantungan intra-rumah tangga,⁷ akhirnya bergantung pada:

- Komposisi usia dalam rumah tangga, yaitu jumlah anggota keluarga yang masuk dalam kelompok usia aktif dan tidak-aktif secara ekonomi, masing-masing;

⁶ Garis kemiskinan adalah tingkat penghasilan minimum yang dianggap penting guna memenuhi kebutuhan konsumsi dasar di suatu negara dan pada waktu tertentu.

⁷ Didefinisikan sebagai rasio ketergantungan actual, yaitu jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja/ jumlah anggota keluarga yang bekerja, daripada rasio anggota rumah tangga yang tidak berada dalam kelompok usia kerja/ anggota rumah tangga yang termasuk dalam kelompok usia kerja.

- Tingkat partisipasi dalam angkatan kerja dari anggota rumah tangga yang berada dalam kelompok usia aktif secara ekonomi, dan;
- Jumlah pengangguran diantara anggota rumah yang aktif secara ekonomi.

Oleh karena itu, beberapa jenis langkah-langkah kebijakan dapat mempengaruhi jumlah pekerja miskin (*working poor*) dan kemiskinan pendapatan (*income poverty*).

- Bantuan tunai ke rumah tangga yang anggotanya hidup dalam kemiskinan mengurangi tekanan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, dengan menurunkan tingkat penghasilan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjadikan pekerja miskin menjadi pekerja produktif. Di kasus-kasus dimana bantuan tunai ini cukup besar untuk mengangkat rumah tangga penerima manfaat ke atas garis kemiskinan, bantuan tunai ini akan mengurangi jumlah pekerja miskin. Bantuan tunai publik yang menargetkan anak-anak, orang lanjut usia atau mereka yang termasuk dalam kelompok usia kerja yang karena satu dan lain hal tidak dapat bekerja juga berperan dalam mengurangi perbedaan dalam rasio ketergantungan intra-rumah tangga lintas rumah tangga yang ada.
- Upaya-upaya untuk mengatasi pengangguran antar mereka yang hidup dalam kemiskinan serta untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana ada cakupan untuk ini, dapat menjadi tindakan yang sangat efektif tidak hanya untuk meningkatkan jumlah pekerja produktif, namun juga dalam mengurangi jumlah pekerja miskin dengan menurunkan ambang batas penghasilan yang diperlukan untuk bisa naik dari pekerja miskin menjadi pekerja produktif.
- Dalam situasi dimana tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih rendah daripada laki-laki, menghapuskan hambatan bagi perempuan untuk memasuki bursa kerja dan menciptakan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dapat menjadi cara yang efektif dalam menurunkan kemiskinan penghasilan. Dengan dua pencari nafkah daripada hanya satu dalam satu rumah tangga, penghasilan yang diperlukan dari tiap anggota rumah tangga yang bekerja untuk mengangkat rumah tangga tersebut keluar dari kemiskinan menjadi jauh lebih rendah.
- Dalam situasi dimana tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi dan tingkat pengangguran rendah antara kaum miskin, penekanan perlu diberikan pada menghasilkan lapangan kerja produktif bagi pendatang baru dan muda ke bursa kerja dan imbal balik dari kerja yang dilakukan oleh pekerja miskin melalui peningkatan dan pembaharuan kesempatan kerja mereka yang ada dan/atau memfasilitasi perpindahan ke peluang kerja lain yang lebih menguntungkan.
- Kebijakan jangka menengah sampai jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah struktur usia penduduk, biasanya melalui penurunan angka kelahiran dan angka fertilitas, juga dapat mempengaruhi jumlah pekerja yang bekerja secara produktif/pekerja miskin.

2.2 Catatan mengenai migrasi tenaga kerja

Kurangnya peluang kerja produktif dalam perekonomian dalam negeri di banyak negara telah mengakibatkan migrasi tenaga kerja ke luar negeri besar-besaran dalam rangka mencari peluang kerja yang lebih menarik. Uang yang dikirimkan ke rumah oleh anggota keluarga yang bekerja di luar negeri memberikan kontribusi yang besar terhadap proporsi penghasilan rumah tangga yang menerimanya dan juga pada total penghasilan di tingkat nasional, uang tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan suatu negara.

Keputusan bagi satu atau beberapa anggota keluarga bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja dapat dilihat sebagai sebuah keputusan investasi dalam kerangka strategi ekonomi rumah tangga. Sama halnya dengan sebagian besar keputusan investasi lainnya, keputusan ini cenderung memerlukan biaya yang tinggi di muka dan melibatkan risiko yang cukup besar serta ketidakpastian, dan dilakukan dengan harapan bahwa keputusan ini akan membawa penghasilan yang jauh lebih tinggi bagi rumah tangga daripada penghasilan yang dikumpulkan tanpa investasi. Untuk rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan, migrasi ke luar negeri untuk bekerja mungkin dianggap sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan karena tidak adanya peluang kerja produktif di dalam negeri.

Di tingkat nasional, pengiriman uang dari luar negeri didaftarkan sebagai transfer internasional dan ditunjukkan dalam neraca nasional. Bagi rumah tangga penerima, uang tersebut kemungkinan besar dianggap sebagai transfer dalam rumah tangga, dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri ke anggota keluarga lainnya. Ini adalah penghasilan dari pekerjaan, dengan satu-satunya perbedaan bahwa sang pengirim uang bekerja di luar negeri.⁸

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri mengurangi tekanan pada perekonomian di dalam negeri untuk menghasilkan kesempatan kerja produktif dalam dua cara: (i) dengan mengurangi jumlah pekerjaan produktif yang diperlukan ekonomi karena sebagian dari angkatan kerja dialihkan ke luar negeri, dan (ii) dengan mengurangi tingkat ambang batas penghasilan yang diperlukan oleh pekerja untuk mengangkat dirinya dan tanggungannya keluar dari kemiskinan karena sebagian dari penghasilan rumah tangga diperoleh dari pengiriman uang (*remittance*). Untuk alasan yang hampir sama, migrasi kerja ke luar negeri juga kemungkinan mengurangi jumlah pekerja miskin, apabila rumah tangga miskin memiliki akses ke peluang untuk bermigrasi kerja ke luar negeri.

⁸ Perbedaan dibuat di neraca nasional juga saldo pembayaran antara pekerja migran yang bekerja sementara di luar negeri, yang didefinisikan kurang dari satu tahun, dan pekerja migran yang telah menetap atau berencana untuk menetap lebih dari satu tahun di luar negeri. Kategori pertama dihitung sebagai penduduk di Negara asal mereka dan sebagai bagian dari angkatan kerja di Negara asal. Uang yang mereka kirimkan ke rumah didaftarkan sebagai 'kompensasi pekerja' dalam saldo pembayaran dan dimasukkan dalam Pendapatan Nasional Bruto atau *gross national income* (GNI), namun bukan dalam PDB (GDP) dari negara asal. Kategori migran yang kedua tidak lagi dimasukkan sebagai penduduk dari Negara asal. Uang yang mereka kirimkan didaftarkan sebagai transfer pribadi dalam saldo pembayaran dan tidak dimasukkan dalam GNI Negara penerima. Namun, pada praktiknya, seringkali sulit untuk membedakan antara dua kategori migran ini.

Di Nepal pada tahun 2008, 30 persen rumah tangga yang menerima kiriman uang terutama berasal dari luar negeri. Pengiriman uang per kapita berada pada 4'042 Rupiah yang mewakili lebih dari setengah dari garis kemiskinan nasional.⁹ Oleh karena itu, orang yang menerima penghasilan yang rendah dari pekerjaan dalam negeri tidak perlu hidup dalam rumah tangga miskin karena penghasilan rumah tangga menerima kiriman uang yang signifikan dari luar negeri.

Meskipun demikian, bagi negara asal dari pekerja migran, migrasi ini hanya merupakan solusi jangka pendek terhadap tantangan dalam menciptakan lapangan kerja produktif untuk semua. Dalam kasus-kasus dimana migrasi ini umumnya bersifat sementara, aliran sumber daya manusia keluar akan segera berkurang dan mendekati nol ketika jumlah migran yang kembali meningkat, sementara pertumbuhan kiriman uang (*remittance*) akan menurun drastis. Dalam kasus dimana migrasi bersifat permanen, aliran sumber daya manusia ke luar secara terus menerus akan segera atau secara perlahan mengurangi kapasitas negara dan perekonomian dalam negeri untuk berkembang. Dapat juga dikatakan bahwa migrasi ke luar negeri bukanlah pengganti dari komitmen nasional untuk mencapai lapangan kerja yang sepenuhnya dan produktif dalam perekonomian dalam negeri.

Namun, aliran tenaga kerja melintasi batas nasional ke luar dalam jumlah yang besar membuat perhitungan kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja produktif menjadi sulit. Mungkin akan bermanfaat apabila perkiraan atau perhitungan tersebut didasarkan pada beberapa skenario, dimana satu skenario berasumsi bahwa migrasi bersih jumlahnya nol dan kiriman uang masuk (*remittance*) yang konstan dan bukannya semakin meningkat.

⁹ Shagun Khare and Anja Slany, *Employment-led growth in Nepal*, Employment Working Paper 76, (Jenewa: ILO, 2011)

3. Pendekatan Metodologi

Konsep-konsep utama

Tingkat pekerja miskin (*working poor rate*): Jumlah total pekerja miskin sebagai persentase dari jumlah total yang bekerja. Apabila data tersedia, dapat dihitung terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Rumah tangga miskin (*poor households*): Rumah tangga dimana konsumsi per kapitanya (atau penghasilan) dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

Angka kemiskinan (*headcount poverty rate*): Persentase total penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ini dihitung sebagai total penduduk yang hidup dalam rumah tangga yang didefinisikan sebagai miskin dan tidak memasukkan perbedaan dalam rumah tangga dalam hal konsumsi. Oleh karena itu tidak terlalu tepat untuk dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

Tingkat kemiskinan rumah tangga: Total jumlah rumah tangga miskin sebagai persentase dari jumlah total rumah tangga.

Rasio pekerja miskin terhadap angka kemiskinan: Tingkat pekerja miskin (*working poor*) dibagi oleh tingkat kemiskinan (*headcount poverty*).

Rasio pekerja miskin terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga: Tingkat kemiskinan.

Informasi yang tepat mengenai jumlah pekerja miskin paling baik diperoleh dari menghitung jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dalam rumah tangga miskin. Walaupun tidak sulit secara teknis, namun pendekatan ini memerlukan akses ke data statistik detil dari survei penghasilan-pengeluaran rumah tangga atau survei serupa lainnya yang menangkap data konsumsi dan/atau penghasilan dan memasukkan informasi dalam status angkatan kerja dari anggota rumah tangga usia kerja. Database KILM (*Key Indicator of the Labour Market – Indikator Utama Bursa Kerja*) ILO menyediakan data mengenai pekerja miskin, bersama dengan sejumlah besar indikator bursa kerja lainnya, sehingga logis apabila database ini menjadi tempat pertama guna mencari data yang akurat mengenai pekerja miskin.¹⁰ Menggunakan data survei rinci memiliki keuntungan tambahan yang memungkinkan kita untuk menggali sejumlah besar karakteristik angkatan kerja lainnya – seperti jenis kelamin, usia, status pekerjaan, sektor kegiatan – dan oleh karenanya memperoleh gambaran yang jauh lebih rinci mengenai pekerja miskin. Ini juga memungkinkan kita memperoleh informasi mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran dan tingkat ketergantungan dalam rumah tangga dan rumah tangga tidak miskin. Informasi mengenai pekerja miskin kadangkala dapat diperoleh dari analisis kemiskinan yang ada, laporan-laporan yang dipublikasikan dari badan statistik nasional yang menghasilkan survei penghasilan-pengeluaran dan studi-studi lainnya berdasarkan pada data dari survei penghasilan-pengeluaran.

¹⁰ Key indicators of the labour market (KILM, edisi ke-7) www.ilo.org/kilm

Database KILM ILO semakin banyak menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai jumlah dan tingkat pekerja miskin di sejumlah negara, sumber informasi ini dapat digunakan untuk membuat perkiraan pekerja miskin untuk tahun-tahun lain daripada tahun data tersebut tersedia dalam KILM, asalkan terdapat informasi mengenai angka kemiskinan (*headcount poverty rate*) atau tingkat kemiskinan rumah tangga (*household poverty rate*).¹¹ Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung rasio pekerja miskin terhadap angka kemiskinan atau rasio pekerja miskin terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga untuk setahun dimana semua data yang diperlukan tersedia dan kemudian mengalikannya dengan angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan rumah tangga untuk tahun lainnya dengan rasio ini. Metode yang sama dapat digunakan untuk membuat proyeksi mengenai pekerja miskin berdasarkan target-target kemiskinan (Lihat bagian berikutnya).

Dalam situasi dimana data mengenai pekerja miskin tidak dapat diakses, ***formula yang disederhanakan*** berikut dapat digunakan untuk memperoleh jumlah pekerja miskin yang mendekati.

The number of working poor = the headcount poverty rate x the total employed population aged 15+.¹²

Jumlah pekerja miskin = angka kemiskinan x total penduduk bekerja berusia 15+

Formula ini berdasarkan pada asumsi bahwa rasio ketergantungan dalam rumah tangga rata-rata aktual dalam rumah tangga tidak miskin dan rumah tangga miskin. Dengan kata lain, formula ini berasumsi bahwa:

- Tingkat kemiskinan penduduk usia kerja sama dengan penduduk secara keseluruhan.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja yang miskin sama dengan tingkat partisipasi penduduk secara keseluruhan;¹³
- Tingkat kesempatan kerja kaum miskin sama dengan tingkat kesempatan kerja untuk penduduk secara keseluruhan.

Dengan mengambil angka kemiskinan (*headcount poverty rate*), kita berasumsi bahwa kemiskinan tersebut terdistribusi secara homogen, mis. angka kemiskinan tersebut adalah x %, kita berasumsi bahwa x % dari total penduduk berusia 15+ adalah miskin dan x % dari mereka yang bekerja dan berusia 15+ adalah pekerja miskin.

¹¹ Untuk informasi mengenai pekerja miskin di negara-negara yang informasinya tersedia di KILM, lihat Lampiran.

¹² Berger, S.; Harasty, C. *World and Regional Employment Prospects: Halving the World's Working Poor by 2010* (Jenewa: ILO, 2002)

15+ biasanya digunakan untuk mendefinisikan penduduk usia kerja standard sebuah negara. Namun, beberapa negara menerapkan batas usia lainnya. Penduduk usia kerja yang didefinisikan di tingkat nasional harus digunakan disini.

¹³ Majid, N. *The size of the working poor population in developing countries* (Jenewa: ILO, 2001).

Ini adalah asumsi yang tidak sepenuhnya realistis karena rasio ketergantungan biasanya lebih tinggi di rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Memang, jumlah anak, lansia dan anggota tidak aktif lainnya dalam rumah tangga seringkali merupakan faktor yang menyumbang pada kemiskinan. Oleh karena ini, formula disederhanakan ini kemungkinan *memberikan perkiraan yang lebih tinggi* atas jumlah pekerja miskin.

Tabel 2 dibawah menyediakan sebuah perbandingan perkiraan tingkat pekerja miskin, berdasarkan pada formula yang disederhanakan ‘proporsi pekerja miskin diantara penduduk bekerja = angka kemiskinan’, dengan jumlah aktual pekerja miskin berdasarkan pada perhitungan data mikro yang rinci dari survei penghasilan-pengeluaran rumah tangga. Seperti yang bisa dilihat, kesenjangan antara perkiraan tingkat pekerja miskin dan tingkat pekerja miskin aktual cukup kecil di sebagian besar negara, walaupun seperti yang diharapkan ada kecenderungan angkanya menjadi sedikit lebih tinggi ketika menggunakan formula yang disederhanakan.

Tabel 2 Pekerja miskin aktual versus perkiraan pekerja miskin berbasis makro di negara-negara terpilih di Afrika Sub-Sahara

Negara	Tahun survei	Tingkat aktual	Tingkat perkiraan	Kesenjangan
Benin	2003	43.6	47.3	3.7
Burundi	1998	85.3	86.4	1.1
Kamerun	2001	31.0	32.8	1.8
Kongo	2005	52.4	54.1	1.7
DRC	2005	93.1	90.0	-3.1
Ghana	1998	34.6	39.1	4.5
Guinea	2002	70.9	70.1	-0.8
Kenya	2005	15.4	19.7	8.8
Malawi	2004	70.7	73.2	2.5
Mali	2006	51.3	51.4	0.1
Mozambique	2002	73.6	74.7	1.1
Niger	2005	61.7	65.9	4.2
Nigeria	2003	58.2	64.4	6.2
Sierra Leone	2003	54.1	53.3	-0.8
Togo	2006	35.8	38.7	2.9
Rata-rata u 15 negara		58.2	61.1	2.9

Sumber: Steven Kapsos, ‘Working poverty’ dalam Theo Sparreboom and Alana Albee (eds.) *Towards Decent Work in Sub-Saharan Africa: Monitoring MDG Employment Indicators* (Jenewa: ILO, 2011).

Keterangan: Perkiraan berdasarkan pada asumsi bahwa proporsi pekerja miskin dalam angkatan kerja = angka kemiskinan (*headcount poverty rate*)

Terlepas dari metode yang digunakan, perhitungan dapat dibuat untuk waktu-waktu yang berbeda untuk membuat perkiraan kuantitatif dari kemajuan dalam menciptakan lapangan kerja produktif. Target-target dan perkiraan ketenagakerjaan dapat disusun guna memenuhi target-target kemiskinan yang ditetapkan, mis. untuk mengurangi kemiskinan (*income poverty*) ekstrem hingga setengahnya pada tahun 2015.

Proyeksi ukuran angkatan kerja pada tahun-tahun mendatang, dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, tersedia di database ILO mengenai statistik ketenagakerjaan (http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html). Proyeksi-proyeksi ini tidak hanya mempertimbangkan perubahan demografi, namun juga perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja pada usia tertentu dan jenis kelamin tertentu, berdasarkan pada faktor-faktor seperti perubahan dalam jumlah rata-rata tahun pendidikan, pertumbuhan ekonomi, manfaat sosial, dll. Dalam situasi dimana proyeksi-proyeksi ini tidak tersedia, seperti contohnya untuk provinsi atau daerah dalam negara, proyeksi berdasarkan secara eksklusif pada perubahan demografi yang dapat diturunkan secara manual.¹⁴

Selain itu, informasi mengenai perkiraan peningkatan bersih dalam angkatan kerja akan memberikan indikasi di bidang apa saja fokus penciptaan kesempatan kerja tersebut harusnya diletakkan: apakah dalam menciptakan peluang kerja produktif untuk pendatang baru kaum muda kedalam angkatan kerja, atau pada membantu pekerja miskin yang ada untuk meningkatkan produktivitas/ imbal balik (penghasilan) dari pekerjaan mereka saat ini, atau memindahkan mereka ke pekerjaan yang lebih produktif.

Informasi mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin tersebut dan jumlah pengangguran akan menghasilkan informasi mengenai kelompok-kelompok demografi spesifik tertentu yang harus menjadi fokus dari intervensi. Informasi tersebut juga akan menghasilkan informasi mengenai seberapa pentingnya bidang-bidang intervensi yang berbeda, seperti mengurangi pekerja miskin, pengangguran atau meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

¹⁴ Contoh bagaimana melakukan ini diberikan dalam Bab 4.2 di bawah.

4. Memperkirakan defisit kesempatan kerja produktif dan memproyeksikan kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja produktif – Langkah demi langkah

Instruksi langkah demi langkah disediakan di bawah ini mengenai bagaimana memperkirakan defisit kesempatan kerja produktif di masa lalu dan di masa kini guna memenuhi target penurunan kemiskinan dan pengangguran. Metode yang lebih disukai dijelaskan dalam bagian 4.1. Metode ini memerlukan akses ke informasi mengenai (tingkat) pekerja miskin, atau, setidaknya, rasio pekerja miskin terhadap angka kemiskinan di salah satu tahun terakhir. Ini juga menggunakan proyeksi ILO yang ada terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Metode ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan perkiraan dan proyeksi yang lebih terpercaya dan akurat serta memungkinkan analisis yang lebih terperinci, mis. melalui disagregasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini diikuti dalam sub-bab 4.2 oleh metode kedua terbaik, yaitu metode yang disederhanakan yang mungkin digunakan dalam situasi-situasi dimana tidak tersedianya informasi mengenai pekerja miskin dan proyeksi pertumbuhan angkatan kerja harus dihitung secara manual. Akhirnya, sebuah lembar kerja Excel yang mudah dipahami disajikan dalam sub-bab 4.3 yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan defisit kesempatan kerja produktif dan memproyeksikan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja produktif dengan sederhana.

4.1 Metode yang lebih disukai dengan menggunakan data mikro dari survei rumah tangga: kasus Bangladesh

4.1.1 Perhitungan defisit kesempatan kerja produktif masa lalu dan masa sekarang

Data yang diperlukan

Identifikasi tahun-tahun belakangan dimana informasi mengenai angkatan kerja dan tingkat kemiskinan tersedia. Pilih dua tahun (tahun yang menjadi data dasar - **baseline** dan tahun **sebelumnya**) dan secara spesifik tariklah informasi mengenai:

- Penduduk usia kerja.
Penduduk usia kerja harus dibatasi pada penduduk yang berusia 15+. Di beberapa negara, mungkin juga terdapat batas usia atas, yang kemudian juga harus digunakan
- Angkatan kerja / bekerja / pengangguran.
- *Headcount poverty rate* (HPR)/ angka kemiskinan.
HPR didasarkan pada baik garis kemiskinan nasional ataupun garis kemiskinan internasional apabila terkait dengan tujuan MDG¹⁵

¹⁵ Untuk tujuan perbandingan, garis kemiskinan internasional cenderung lebih dipilih. www.ilo.org/kilm table 18a

- Jumlah pekerja miskin dari data mikro yang diperoleh dari survei sosial ekonomi atau pendapatan/pengeluaran rumah tangga atau dari KILM.
- *Working poverty rate* (WPR)/ tingkat pekerja miskin,¹⁶ diperoleh dari KILM atau dihitung sebagai jumlah pekerja miskin / total penduduk usia kerja yang bekerja * 100.

Data mengenai penduduk usia kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja sebaiknya diperoleh dari sensus penduduk atau survei angkatan kerja. Survei sosial ekonomi atau pendapatan pengeluaran rumah tangga biasanya memiliki beberapa informasi mengenai angkatan kerja dan ketenagakerjaan, namun harus dianggap sebagai sumber terbaik kedua untuk jenis informasi ini. Ingatlah bahwa informasi mengenai pengangguran yang diperoleh dari laporan administrasi cenderung mengacu ke pengangguran terdaftar, yang mungkin berbeda jauh dari pengangguran aktual. Jumlah pekerja miskin dan tingkat pekerja miskin (*working poverty rate*) diperoleh dari data mikro dari survei sosial ekonomi atau pendapatan pengeluaran rumah tangga. Bagi banyak negara, data di atas juga dapat diperoleh dari database ILO, KILM (www.ilo.org/kilm) dan LABORSTA(www.laborsta.ilo.org). Apabila kedua survei sosial ekonomi rumah tangga dan survei angkatan kerja tersedia pada kurang lebih tahun yang sama, direkomendasikan untuk menghitung tingkat pekerja miskin (*working poverty rate*) dari sumber sebelumnya dan menggunakan data dari survei angkatan kerja untuk semua data terkait ketenagakerjaan lainnya.

Perhitungan:

- ❖ LFPR (*Labour Force Participation Rate* /Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) =
$$\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$
- ❖ *Unemployment rate* (Tingkat Pengangguran)=
$$\frac{\text{Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$$
- ❖ *Productive employment* (Kesempatan kerja produktif) = angkatan kerja bekerja – pekerja miskin atau angkatan kerja – defisit kesempatan kerja produktif
- ❖ *Deficit of productive employment* (Defisit kesempatan kerja produktif) = angkatan kerja – yang bekerja secara produktif atau pengangguran + pekerja miskin
- ❖ *Working poverty rate* (WPR) atau Tingkat pekerja miskin = Pekerja miskin / total kesempatan kerja x 100
- ❖ Rasio pekerja miskin/ kemiskinan (%) = Tingkat pekerja miskin (*working poverty rate*) / angka kemiskinan (*headcount poverty rate*)

¹⁶ www.ilo.org/kilm Tabel 18b. Catatlah bahwa WPR didasarkan pada garis kemiskinan internasional 1.25USD dan 2.00 USD

Metodologi langkah per langkah

1. Tariklah informasi mengenai **penduduk usia kerja, angkatan kerja, angkatan kerja yang bekerja, pengangguran** pada **tahun baseline** (tahun terakhir dimana semua data yang diperlukan tersedia) dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
Hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja atau *labour force participation rate* (LFPR) / tingkat aktivitas (*activity rate*).
Hitunglah tingkat pengangguran.

Tabel 3 Karakteristik angkatan kerja di Bangladesh, 2005

	Total	Laki-laki	Perempuan
Dalam 000			
Penduduk usia kerja	92'402.3	47'209.4	45'192.9
Angkatan kerja	65'211.6	40'107.6	25'104.0
Tingkat LFP %	70.6	85.0	55.5
Pengangguran	2'104.0	1'256.0	848.0
Bekerja	63'107.6	38'851.6	24'256.0
Tingkat pengangguran %	3.2	3.1	3.4

Sumber: KILM, Edisi ke-7

[www.laborsta.ilo.org](http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html)

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html

Keterangan: Penduduk usia kerja dan angka angkatan kerja diambil dari proyeksi angkatan kerja (mengacu ke tautan di atas), karena angka partisipasi angkatan kerja perempuan survei angkatan kerja (LFS) pada tahun 2005 sangatlah rendah, tidak masuk akal dan tidak cocok apabila dibandingkan dengan data LFS sebelum-sebelumnya. Angka-angka pengangguran diambil dari LFS 2005.

2. Tariklah informasi mengenai angka kemiskinan (*headcount poverty rate*), jumlah pekerja miskin dan hitunglah tingkat pekerja miskin (*working poverty rate*). Jumlah **pekerja miskin** dapat didasarkan pada data mikro dari survei pendapatan-pengeluaran atau sosial ekonomi rumah tangga di **tahun baseline** atau diturunkan dari perkiraan tingkat pekerja miskin atau *working poverty rate* dari KILM¹⁷ (pekerja miskin = bekerja × tingkat pekerja miskin).
Perkirakan jumlah **mereka yang bekerja secara produktif** (tidak memasukkan pengangguran yang tidak miskin) dan **defisit kesempatan kerja produktif**.

Tabel 4 Struktur angkatan kerja di Bangladesh, 2005

	Total	Laki-laki	Perempuan
Dalam 000			
Penduduk usia kerja	92'402.3	47'209.4	45'192.9
Angkatan kerja	65'211.6	40'107.6	25'104.0
Pengangguran	2'104.0	1'256.0	848.0
Bekerja	63'107.6	38'851.6	24'256.0
- Pekerja miskin	31'616.9	19'503.5	11'933.9

¹⁷ www.ilo.org/kilm, Table 18b.

- Bekerja produktif	31'490.7	19'348.1	12'322.0
Defisit kesempatan kerja produktif	33'720.9	20'759.5	12'781.9
Dalam %			
Tingkat partisipasi ang. kerja LFP	70.6	85.0	55.5
Tingkat pengangguran	3.2	3.1	3.4
Angka kemiskinan (<i>Headcount poverty rate</i>)	50.5	50.5	50.5
Tingkat pekerja miskin (<i>Working poverty rate</i>)	50.1	50.2	49.2
Rasio pekerja miskin / kemiskinan	0.99	0.99	0.97
Tingkat kesempatan kerja produktif	48.3	48.2	49.1

Sumber: KILM, Edisi ke-7 Tabel 18a & 18b
www.laborsta.ilo.org

3. Lakukan hal yang sama untuk **tahun apapun sebelumnya** yang memiliki semua informasi di atas.

Tabel 5 Struktur angkatan kerja di Bangladesh, 2000

	Total	Laki-laki	Perempuan
Dalam 000			
Penduduk usia kerja	81'258.6	41'739.2	39'519.4
Angkatan kerja	57'288.1	35'824.9	21'463.3
Pengangguran	1'749.0	1'083.0	666.0
Bekerja	55'539.1	34'741.9	20'797.3
- Pekerja miskin	31'157.5	19'524.9	11'604.9
- Bekerja produktif	24'381.7	15'216.9	9'192.4
Defisit kesempatan kerja produktif	32'906.5	20'607.9	12'270.9
Dalam %			
Tingkat partisipasi ang. kerja LFP	70.5	85.8	54.3
Tingkat pengangguran	3.1	3.0	3.1
Angka kemiskinan (<i>Headcount poverty rate</i>)	56.1	56.1	56.1
Tingkat pekerja miskin (<i>Working poverty rate</i>)	56.1	56.2	55.8
Rasio pekerja miskin / kemiskinan	1.00	1.00	0.99
Tingkat kesempatan kerja produktif	42.6	42.5	42.8

Sumber: KILM, Edisi ke-7, Tabel 18a & 18b
www.laborsta.ilo.org

Keterangan: Perkiraan ILO (mengacu ke tautan di atas) digunakan untuk memperoleh angka-angka penduduk usia kerja dan angkatan kerja guna memastikan angka tersebut dapat diperbandingkan dengan data tahun 2005. Lihat juga keterangan dari tabel sebelumnya. Angka-angka pengangguran didasarkan pada angka-angka pada LFS 2000.

4. Hitunglah **perubahan antara tahun baseline dan tahun sebelumnya** serta perubahan tahunan dan dalam persentase selama periode tersebut guna menganalisa kinerja masa lalu dalam menciptakan kesempatan kerja produktif dan mengurangi pekerja miskin dan pengangguran.

Tabel 6 Perubahan dalam angkatan kerja antara tahun 2000-2005, Bangladesh

	Perubahan 2000-2005			Perubahan tahunan 2000-2005			% perubahan 2000-2005		
	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan
Dalam 000									
Penduduk usia kerja	11'143.7	5'470.2	5'673.4	2'228.7	1'094.0	1'134.7	13.7	13.1	14.4

Angkatan kerja	7'923.5	4'282.8	3'640.7	1'584.7	856.6	728.1	13.8	12.0	17.0
Bekerja	7'568.5	4'109.8	3'458.7	1'513.7	822.0	691.7	13.6	11.8	16.6
Pengangguran	355.0	173.0	182.0	71.0	34.6	36.4	20.3	16.0	27.3
Pekerja miskin	459.5	-21.4	329.1	91.9	-4.3	65.8	1.5	-0.1	2.8
Kesempatan kerja produktif	7'109.0	4'131.2	3'129.6	1'421.8	826.2	625.9	29.2	27.1	34.0
Defisit kesempatan kerja produktif	814.5	151.6	511.1	162.9	30.3	102.2	2.5	0.7	4.2
Dalam %									
Tingkat LFP	0.1	-0.8	1.2						
Tingkat pengangguran	0.1	0.1	0.3						
Tingkat pekerja miskin	-6.0	-6.0	-6.6						
Tingkat kesempatan kerja produktif	5.7	5.7	6.3						

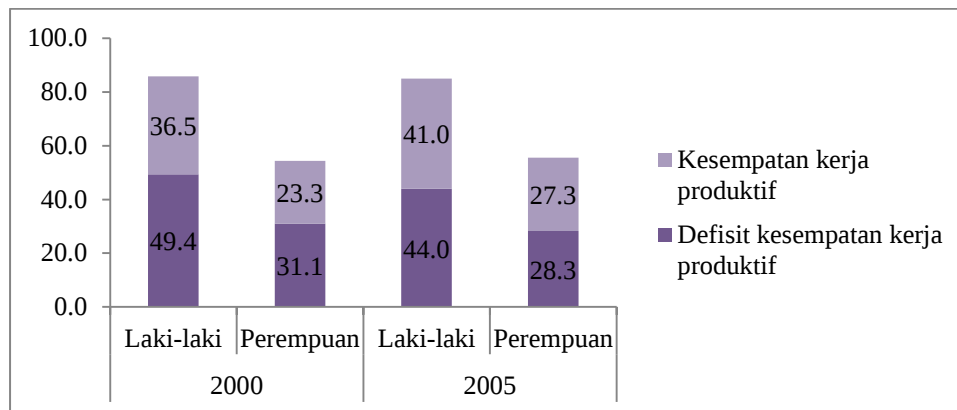
Sumber: Ibid

Interpretasi hasil

Tabel 4, 5, 6 di atas menunjukkan karakteristik angkatan kerja Bangladesh pada tahun 2000 dan 2005 dan perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Angkatan kerja tumbuh kurang lebih dengan kecepatan yang sama dengan penduduk usia kerja selama periode tersebut, dan berakibat pada perubahan kecil dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesenjangan yang amat besar antara partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki sepertinya sedikit mengecil, namun partisipasi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja masih sangat rendah pada akhir periode tersebut. Tingkat pengangguran meningkat sedikit untuk laki-laki dan perempuan, namun tetap di tingkat yang cukup rendah yaitu sedikit diatas tiga persen. Kemiskinan walaupun bekerja (*working poverty*) secara keseluruhan tetap menjadi persoalan yang meluas di Bangladesh dibandingkan dengan pengangguran.

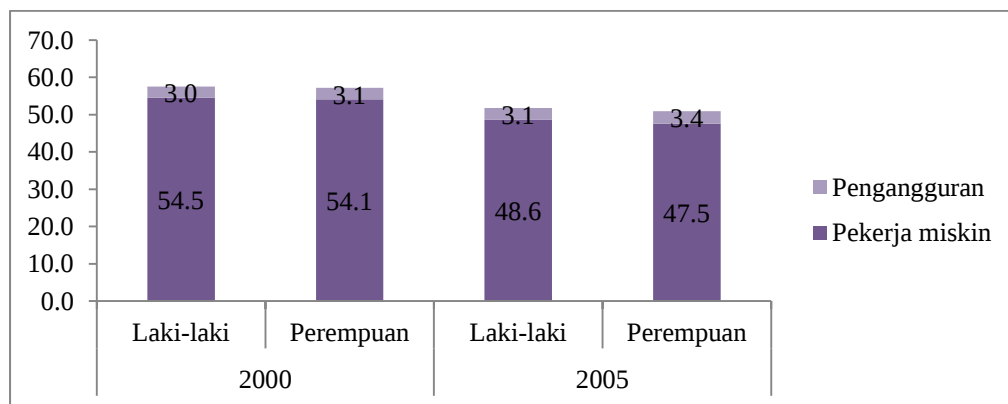
Peningkatan dalam kesempatan kerja disertai dengan peningkatan dalam kesempatan kerja produktif yang signifikan sebesar 7.1 juta, yaitu hampir 30 persen selama periode tersebut. Sebagai akibatnya, defisit kesempatan kerja produktif hanya meningkat sedikit dalam arti absolutnya, sementara penurunannya cukup signifikan secara relatif. Seperti yang sudah diharapkan, jatuhnya tingkat pekerja miskin berakibat pada jatuhnya angka kemiskinan, yaitu sekitar 5 unit persentase selama periode tersebut. Seperti yang diindikasikan dalam **Gambar 2**, proporsi defisit kesempatan kerja produktif dalam penduduk usia kerja berkurang sementara proporsi kesempatan kerja produktif meningkat antara tahun 2000 dan 2005 baik untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, dilihat dari sisi lain, sebuah gambaran yang suram muncul. Pada tahun 2005, hanya 44 persen dari penduduk usia kerja laki-laki dan hanya 28 persen dari penduduk usia kerja perempuan yang bekerja secara produktif. Proporsi perempuan yang berada dalam usia kerja dan bekerja secara produktif sangatlah rendah, sama halnya dengan tingkat partisipasi perempuan yang sangat rendah dalam angkatan kerja dan jumlah pekerja miskin yang besar.

Gambar 2 Struktur penduduk usia kerja



Melihat komposisi dari defisit lapangan kerja produktif untuk laki-laki dan perempuan (**gambar 3**), dapat dilihat bahwa defisit tersebut sebagian besar berwujud pekerja miskin (*working poverty*), yang mempengaruhi hampir setengah dari angkatan kerja, dimana dampak terhadap pengangguran kurang dari 5 persen pada tahun 2005. Proporsi pekerja miskin dalam angkatan kerja berkurang sebesar 6 unit persentase untuk laki-laki dan perempuan selama periode tersebut. Namun, tetap pada akhir periode, jumlah pekerja miskin aktual sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlahnya lima tahun sebelumnya.

Gambar 3 Struktur defisit kesempatan kerja produktif (sebagai % dari angkatan kerja)



4.1.2 Untuk memperoleh perkiraan dan target berdasarkan target kemiskinan dan pengangguran

Data yang diperoleh

Selain dari angka-angka yang diperoleh selama langkah sebelumnya, data berikut diperlukan:

- Perkiraan penduduk usia kerja dan angkatan kerja di tahun sasaran.
- Target kemiskinan dan/atau target pengangguran di tahun sasaran
- Rasio tingkat pekerja miskin (*working poverty*) / angka kemiskinan (*headcount poverty rate*) di tahun *baseline*.

Kita berasumsi bahwa rasio ini tetap tidak berubah antara tahun *baseline* dengan tahun sasaran.

Metodologi langkah-per-langkah

5. Tariklah informasi mengenai **perkiraan total penduduk usia kerja** dan perkiraan **total angkatan kerja** untuk tahun sasaran. Ini bisa diperoleh dari proyeksi penduduk yang aktif secara ekonomi dari database ILO¹⁸ atau dari perkiraan nasional. Sebuah perkiraan juga dapat dihitung secara manual (lihat sub-bab 4.3)
6. Carilah informasi mengenai **target angka kemiskinan (*headcount poverty target*)** untuk tahun sasaran atau untuk 2015 apabila terkait dengan target MDG. Tujuan MDG dalam menurunkan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan menjadi setengahnya antara tahun 1990 dan 2015 menyiratkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 haruslah tidak lebih dari setengah angka kemiskinan pada tahun 1990. Target MDG spesifik negara tertentu biasanya dapat ditemukan dalam halaman awal web UND P untuk negara terkait. Target spesifik negara atau target MDG juga dapat ditemukan di sebagian besar situs web Pemerintah terkait.¹⁹
7. Perkirakan **tingkat pekerja miskin (*working poverty rate*)** di tahun sasaran sebagai *angka kemiskinan di tahun sasaran x rasio tingkat pekerja miskin/ angka kemiskinan di tahun baseline (%)* atau [*the headcount poverty rate at target year x ratio working poverty rate / headcount poverty rate at baseline year (%)*]. Ini bisa dilakukan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan serta untuk kedua jenis kelamin digabungkan
8. Cari taulah apakah ada **target untuk pengangguran maksimum** pada akhir dari periode strategi. Perkirakan **jumlah pengangguran** di tahun sasaran berdasarkan pada target pengangguran sebagai *target tingkat pengangguran di tahun sasaran x perkiraan angkatan kerja di tahun sasaran* [*target unemployment rate at the target year x estimated labour force at target year*]. Apabila tidak ada target pengangguran, tingkat pengangguran saat ini dapat digunakan sebagai target minimum, atau skenario-skenario yang berbeda dengan tingkat pengangguran yang berbeda dapat dibuat. Apabila tidak ada target pengangguran untuk jenis kelamin tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa targetnya sama untuk laki-laki dan perempuan.
9. Hitung dan tentukan:
 - Jumlah perkiraan **yang bekerja** di tahun sasaran, sebagai *perkiraan angkatan kerja kurang perkiraan jumlah pengangguran* [*estimated labour force minus estimated number of unemployed*];

¹⁸ http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html

¹⁹ Lihat juga tabel 18 dalam KILM (www.ilo.org/kilm)

- **Pekerja miskin** sebagai *perkiraan jumlah yang bekerja x tingkat pekerja miskin* [*estimated number of employed x working poverty rate*] di tahun sasaran;
- **Bekerja secara produktif** sebagai *jumlah yang bekerja kurang pekerja miskin* [*employed minus working poor*], dan
- Target kuantitatif untuk **kesempatan kerja produktif** sebagai *total angkatan kerja kurang perkiraan jumlah pekerja miskin dan pengangguran* [*total labour force minus the estimated number of working poor dan unemployed*].

Tabel 7 Perkiraan angkatan kerja – Bangladesh, 2015

	Total	Laki-laki	Perempuan
Dalam 000			
Penduduk Usia Kerja (WAP)	113'705.2	57'278.9	56'426.4
Angkatan Kerja (LF)	80'839.8	48'033.1	32'806.7
Pengangguran	3'233.6	1'921.3	1'312.3
Bekerja	77'606.2	46'111.8	31'494.4
- Pekerja miskin	20'210.3	12'032.4	8'054.5
- Bekerja produktif	57'395.9	34'079.4	23'440.0
Defisit kesempatan kerja produktif	23'443.9	13'953.8	9'366.7
Dalam %			
Tingkat partisipasi angk. kerja (LFP)	71.1	83.9	58.1
Tingkat pengangguran	4.0	4.0	4.0
Angka kemiskinan atau <i>Headcount poverty rate</i> (HPR)	26.3	26.3	26.3
Tingkat pekerja miskin atau <i>Working poverty rate</i>	26.0	26.1	25.6
Rasio pekerja miskin / kemiskinan	0.99	0.99	0.97

Sumber & Keterangan:

- Target HPR adalah setengah dari HPR pada tahun 1989 (52.5%)
- Tingkat pengangguran ditetapkan pada 4% untuk laki-laki dan perempuan.
- Data 2015 mengenai penduduk usia kerja (WAP atau *working age population*) dan angkatan kerja (LF atau *labour force*) adalah perkiraan dari http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html
- Rasio pekerja miskin / kemiskinan (%) diasumsikan tidak akan berubah antara tahun *baseline* (2005) dan tahun sasaran (2015).
- Angka untuk laki-laki dan perempuan tidak sama dengan jumlah total karena kesalahan pembulatan.

Tabel 8 Perkiraan kebutuhan atas kesempatan kerja produktif – Bangladesh, 2005-2015 (dalam 000)

	Perubahan 2000-2005			Perubahan tahunan 2000-2005			% perubahan 2000-2005		
	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia kerja	21'302.9	10'069.4	11'233.5	2'130.3	1'006.9	1'123.3	23.1	21.3	24.9
Angkatan kerja	15'628.2	7'925.5	7'702.7	1'562.8	792.6	770.3	24.0	19.8	30.7
Bekerja	14'498.6	7'260.2	7'238.4	1'449.9	726.0	723.8	23.0	18.7	29.8
Pengangguran	1'129.6	665.3	464.3	113.0	66.5	46.4	53.7	53.0	54.7
Pekerja miskin	11'406.6	7'471.1	3'879.5	1'140.7	747.1	387.9	-36.1	-38.3	-32.5
Kesempatan kerja produktif	25'905.2	14'731.3	11'117.9	2'590.5	1'473.1	1'111.8	82.3	76.1	90.2
Defisit kesempatan kerja produktif	10'277.0	6'805.7	3'415.2	1'027.7	680.6	341.5	-30.5	-32.8	-26.7

10. Hitunglah jumlah kesempatan kerja produktif yang perlu diciptakan guna mencapai target kemiskinan dan pengangguran di tahun akhir sebagai *target kesempatan kerja produktif di tahun akhir minus kesempatan kerja produktif di tahun baseline* atau [*productive employment target at end-year minus productive employment at baseline year*]²⁰. Ini akan memberikan jumlah kesempatan kerja dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan baru karena (i) adanya peningkatan dalam angkatan kerja dan (ii) target pengurangan pengangguran. Perubahan dalam jumlah pekerja miskin akan memberikan (iii) jumlah pekerjaan yang perlu ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas dan penghasilan atau digantikan dengan pekerjaan produktif lainnya.

Sintesisikan temuan dan bandingkan perkiraan ini dengan kinerja masa lalu untuk menarik kesimpulan.

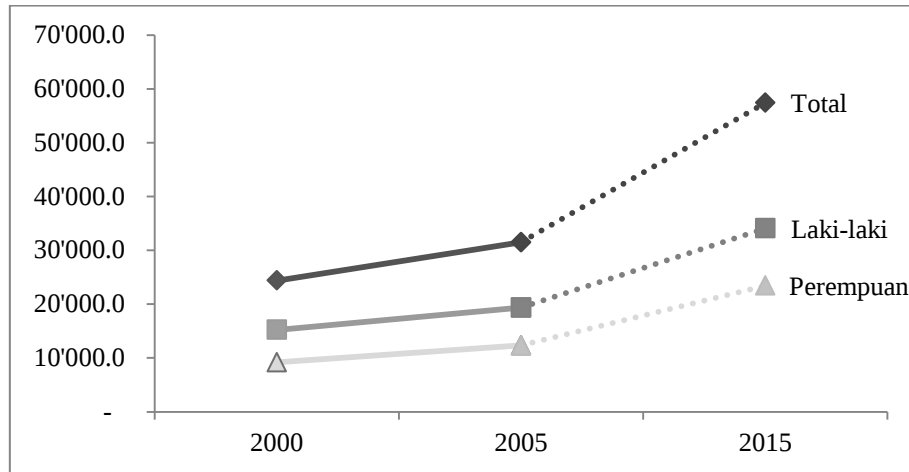
Interpretasi hasil

Tabel 8 dan gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat 24.4 juta pekerjaan produktif pada tahun 2000 dan 31.5 juta pada tahun 2005, dimana lebih dari 57 juta pekerjaan produktif akan diperlukan pada tahun 2015 guna mencapai target pengangguran dan kemiskinan. Dengan kata lain, hampir 26 juta pekerjaan produktif perlu diciptakan antara tahun 2005 dan 2015. Ini berarti bahwa jumlah pekerjaan produktif yang diciptakan tiap tahunnya harus jauh lebih

²⁰ Peningkatan dalam kesempatan kerja dan penurunan pengangguran memberikan indikasi jumlah minimum pekerjaan produktif baru yang perlu diciptakan.

banyak dibandingkan dengan 7.1 juta pekerjaan produktif yang diciptakan antara tahun 2000 dan 2005.

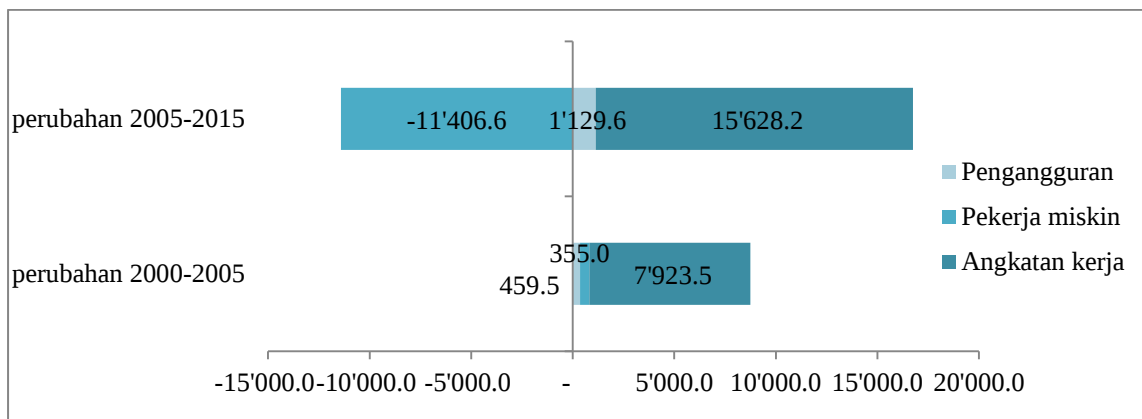
Gambat 4 Pekerjaan produktif yang diciptakan dan perkiraan kebutuhan untuk pekerjaan produktif



Gambar 5 di bawah ini menunjukkan bahwa peningkatan pekerjaan produktif diperlukan untuk memenuhi permintaan atas pekerjaan produktif dari sejumlah besar pendatang baru kedalam angkatan kerja (15.6 juta). Penurunan pengangguran akan memerlukan 1.1 juta pekerjaan produktif tambahan. Tantangan besar lainnya adalah untuk menurunkan jumlah pekerja miskin. Ini akan memerlukan penciptaan 1.1 juta pekerjaan produktif tambahan, baik melalui peningkatan pekerjaan pekerja miskin yang ada atau memungkinkan pekerja miskin untuk bergeser ke pekerjaan lain yang lebih baik.

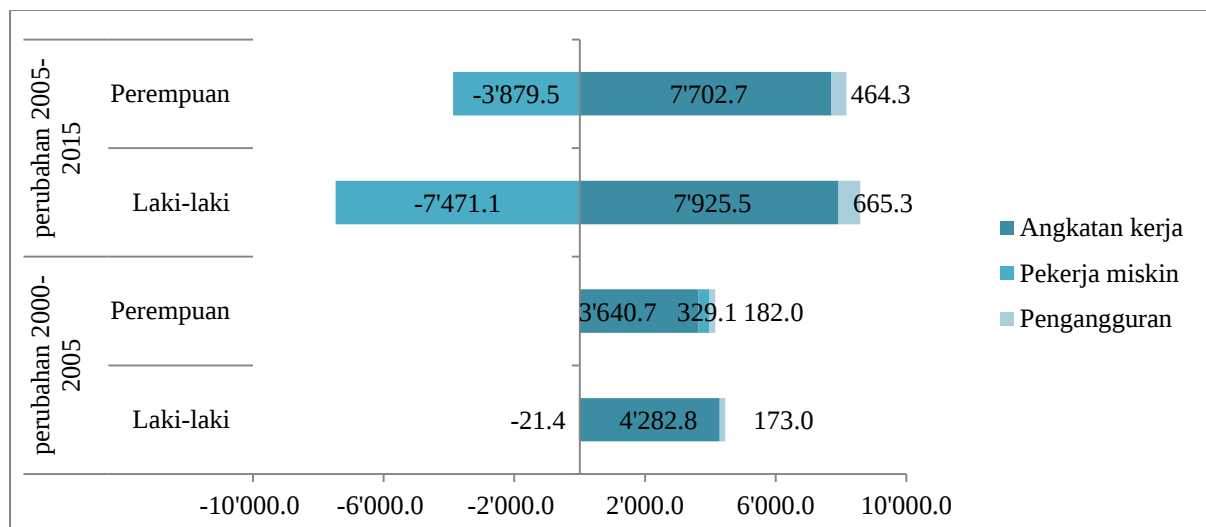
Membandingkan target-target dengan kinerja masa lalu (tahun 2000 sampai 2005), seseorang dapat langsung menyadari bahwa upaya yang jauh lebih keras untuk mengurangi pekerja miskin akan diperlukan. Jumlah pekerja miskin sebenarnya meningkat sebesar 459 ribu antara tahun 2000 dan 2005. Sebaliknya, jumlah pekerja miskin perlu diturunkan sebesar lebih dari 1.1 juta per tahun antara tahun 2005 dan 2015 untuk mencapai target, yang berarti bahwa upaya besar-besaran diperlukan untuk mengurangi jumlah pekerja miskin selama tahun-tahun mendatang sampai 2015, baik melalui peningkatan produktivitas maupun penghasilan dari pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja miskin secara signifikan atau membuatnya mungkin bagi pekerja miskin untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan lebih produktif.

Gambar 5 Target ketenagakerjaan diuraikan (dalam 000)



Target ketenagakerjaan dapat juga diuraikan berdasarkan jenis kelamin. **Gambar 6**

Gambar 6 Target ketenagakerjaan diuraikan berdasarkan jenis kelamin (dalam 000)



4.2 Metode yang disederhanakan: Kasus Maluku, Indonesia

Kasus Provinsi Maluku di Indonesia digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana perkiraan defisit kesempatan kerja yang mendekati dan proyeksi kebutuhan atas penciptaan kesempatan kerja produktif dapat dikembangkan dalam sebuah situasi dimana tidak ada perhitungan tepat terhadap jumlah pekerja miskin yang dapat dibuat karena kurangnya akses ke data dan ketika tidak mungkin mendasarkan proyeksi tersebut pada perkiraan pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Seperti yang didiskusikan di atas, metode ini harus digunakan dengan berhati-hati karena metode ini didasarkan pada asumsi yang dapat melemahkan reliabilitas hasilnya. Perkiraan jumlah pekerja miskin yang diperoleh melalui metode ini umumnya akan menghasilkan angka yang lebih tinggi daripada angka aktual. Namun, dalam perekonomian yang berpenghasilan rendah dengan sedikitnya perlindungan sosial dalam banyak kesempatan kemungkinan besar akan menghasilkan perkiraan yang cukup baik dan masuk akal.

Menetapkan target untuk kesempatan kerja produktif pada satu tahun sasaran memerlukan perkiraan penduduk usia kerja dan angkatan kerja pada tahun sasaran. Tahun sasaran harus sesuai dengan tahun dimana target kemiskinan dan target lainnya eksplisit, seperti target pengangguran, tersedia.

Proyeksi harus menghasilkan kuantifikasi kebutuhan kesempatan kerja produktif di tahun sasaran guna memenuhi target-target kemiskinan dan/atau pengangguran. Ini juga menyediakan informasi mengenai perubahan dalam defisit kesempatan kerja produktif antara tahun *baseline* dan tahun sasaran. Walaupun memungkinkan untuk membuat uraian proyeksi yang diperoleh melalui metode yang disederhanakan berdasarkan jenis kelamin, uraian semacam itu hanya akan menghasilkan sedikit informasi tambahan sebagai jumlah pekerja miskin (*working poor*) dan tingkat pekerja miskin (*working poverty rate*) tidak dapat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

4.2.1 Untuk memperoleh perkiraan dan target berdasarkan target kemiskinan dan pengangguran

Data yang diperlukan

Identifikasi sebuah tahun *baseline* dimana informasi angkatan kerja dan angka kemiskinan tersedia dan secara spesifik tarikhlah informasi mengenai:

Total penduduk dan penduduk usia kerja berdasarkan kelompok usia pada tahun *baseline*. Penduduk usia kerja harus dibatasi pada penduduk berusia 15+. Di beberapa negara mungkin juga ada batas atas usia yang ditentukan di tingkat nasional, yang harus digunakan disini.

Data mengenai penduduk harus datang dari sensus penduduk atau proyeksi penduduk apabila sensus tidak tersedia.

- Angkatan kerja berdasarkan kelompok usia di tahun *baseline*
Data mengenai angkatan kerja dan kesempatan kerja mungkin datang dari sumber-sumber yang berbeda: survei rumah tangga, survei angkatan kerja (LFS – *Labour Force Survey*) atau data administrasi melalui LFS lebih diutamakan.²¹
- Total jumlah angkatan kerja yang bekerja (*employed*).
- Jumlah penganggur atau tingkat pengangguran
- Angka kemiskinan atau *headcount poverty rate* (HPR). HPR didasarkan pada baik garis kemiskinan nasional atau garis kemiskinan internasional terkait dengan tujuan MDG.

Informasi mengenai total penduduk dan penduduk usia kerja yang terbaik diperoleh dari sensus penduduk terkini. Perkiraan resmi atau survei angkatan kerja memberikan pilihan terbaik kedua. Perkiraan dapat juga diperoleh dari database ILO, khususnya LABORSTA dan

²¹ www.laborsta.ilo.org

dari perkiraan penduduk PBB.²² Data angkatan kerja – angkatan kerja, kesempatan kerja dan pengangguran – diperoleh dari survei angkatan kerja, namun juga dapat diperoleh dari sensus penduduk, atau, sebagai sumber terbaik kedua, dari survei sosial ekonomi rumah tangga atau survei pendapatan – pengeluaran rumah tangga. Bagi banyak negara, informasi angkatan kerja dapat juga diperoleh dari basis data ILO, terutama KILM dan LABORSTA. Catatlah bahwa data pengangguran diperoleh dari sumber-sumber administratif yang biasanya mengacu pada pengangguran terdaftar, yang mungkin berbeda secara signifikan dari pengangguran aktual. Angka kemiskinan (*headcount poverty rate*) diperoleh dari survei sosial ekonomi rumah tangga atau survei pendapatan/pengeluaran rumah tangga. Data ini biasanya dilaporkan dalam analisis yang didasarkan pada survei-survei semacam ini serta dalam dokumen /situs web resmi pemerintah. Kantor UNDP nasional biasanya memantau dan melaporkan kemajuan dari target-target MDG dalam mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi setengahnya.

Perhitungan:

- ❖ Tingkat pengangguran =
- ❖ Tingkat partisipasi angkatan kerja atau LFPR (*Labour Force Participation Rate*) =
- ❖ Pekerja miskin (*Working poor*) = penduduk usia kerja bekerja × angka kemiskinan atau *headcount poverty rate* (HPR)
- ❖ Defisit kesempatan kerja produktif = pengangguran + pekerja miskin
- ❖ Kesempatan kerja produktif = penduduk usia kerja bekerja – pekerja miskin atau Kesempatan kerja produktif = penduduk usia kerja bekerja × (1 -HPR) atau angkatan kerja - defisit kesempatan kerja produktif

Metodologi langkah per langkah

1. Tariklah informasi mengenai **angka kemiskinan (%)** atau ***headcount poverty rate***, **total penduduk** dan **angkatan kerja** berdasarkan kelompok usia (sebaiknya dalam rentang 5 tahun, mis. 15-19, 20-24, dst.) untuk **tahun baseline** (tahun terakhir dimana semua data yang diperlukan tersedia).
Hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja atau *labour force participation rate* (LFPR) / tingkat aktivitas (*activity rate*) berdasarkan kelompok usia.

Tabel 9 Karakteristik angkatan kerja– Maluku, 2010

Kelompok usia	Penduduk	Angkatan Kerja	LFPR (%)
0-4	187,539		
5-9	192,553		
10-14	174,409		
15-19	142,761	35,416	24.8
20-24	129,277	76,351	59.1
25-29	130,541	99,776	76.4
30-34	114,379	89,154	77.9

²² <http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm>

35-39	99,504	81,378	81.8
40-44	85,552	71,230	83.3
45-49	74,546	62,775	84.2
50-54	62,335	51,366	82.4
55-59	44,893	36,406	81.1
60+	95,217	49,879	52.4
Total 15+	979,005	653,731	66.8
Total penduduk.	1,533,506		

Sumber: Angka kependudukan: *Hasil sensus penduduk 2010, Data Agregat per Provinsi, Population Census Results 2010, Aggregate data by Province*, BPS. Jakarta, Indonesia; angka LFPR berdasarkan pada data LFS yang diolah oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id>

- Carilah informasi mengenai **target angka kemiskinan (*headcount poverty*)** untuk tahun sasaran atau untuk tahun 2015 terkait dengan target MDG. Tujuan MDG untuk menurunkan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan menjadi setengahnya antara tahun 1990 dan 2015 menyiratkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 haruslah tidak lebih dari setengah dari angka kemiskinan pada tahun 1990. Target MDG spesifik negara tertentu biasanya dapat ditemukan di situs web kantor UNDP untuk negara terkait. Target nasional atau MDG juga dapat ditemukan di sebagian besar situs web Pemerintah. Target-target pemerintah dapat tersedia di situs web resmi pemerintah atau pemerintah provinsi. Carilah informasi mengenai **target untuk pengangguran maksimum** pada akhir dari periode strategi.
- Hitunglah **perkiraan total penduduk usia kerja** berdasarkan kelompok usia dan **total angkatan kerja** pada tahun sasaran. Seringkali, perkiraan dapat diperoleh dari basis data ILO. Apabila tidak tersedia, perkiraan yang dihitung secara manual dapat diperoleh mengikuti prosedur di bawah ini.²³

Penduduk usia kerja berdasarkan kelompok usia dapat diperkirakan dengan menukar angka-angka dari kelompok usia sebelumnya dari tahun *baseline* ke kelompok usia berikutnya di tahun sasaran. Contohnya, mereka yang berada di kelompok usia 10-14 tahun pada tahun 2010 akan menjadi kelompok usia 15-19 pada tahun 2015.²⁴

- Penduduk berdasarkan kelompok usia di tahun *baseline*
- Angkatan kerja di tahun *baseline*
- Target kemiskinan dan/atau pengangguran

²³ <http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eaep E.html>

²⁴ Karena pendatang baru kedalam angkatan kerja sampai tahun 2015 telah lahir dan dengan asumsi bahwa angka kematian tidak signifikan dalam kelompok usia terkait, perkiraan penduduk dalam kelompok usia aktif secara ekonomi pada tahun 2015 seharusnya cukup akurat.

Perhitungan:

- ❖ Tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR atau tingkat aktivitas) di tahun *baseline* =
- ❖ Angkatan Kerja (LF) tahun sasaran = LFPR berdasarkan kelompok usia tahun *baseline* x Penduduk usia kerja berdasarkan kelompok usia tahun sasaran
- ❖ Pekerja miskin (WP) = Angkatan kerja yang bekerja (*employed*) x angka kemiskinan (*headcount poverty rate*).
- ❖ Bekerja secara produktif = Angkatan kerja yang bekerja (*employed*) – pekerja miskin (WP) atau Bekerja secara produktif = kesempatan kerja x (1-HPR) atau Angkatan kerja – defisit kesempatan kerja produktif
- ❖ Defisit kesempatan kerja produktif = Pekerja Miskin (WP) + pengangguran atau tingkat pengangguran x perkiraan angkatan kerja PLUS perkiraan jumlah angkatan kerja yang bekerja (angkatan kerja – pengangguran) x target tingkat kemiskinan.

Perkiraan angkatan kerja di tahun sasaran adalah ***jumlah*** dari *perkiraan penduduk usia kerja berdasarkan kelompok usia di tahun sasaran x tingkat partisipasi angkatan kerja spesifik kelompok atau [the sum of the estimated working age population by age groups at the target year x the age group specific labour force participation rates]*.²⁵

Tabel 10 Perkiraan angkatan kerja – Maluku, 2015

	Penduduk	Angkatan kerja	LFPR (%)
15-19	174,409	43,267	24.8
20-24	142,761	84,315	59.1
25-29	129,277	98,810	76.4
30-34	130,541	101,752	77.9
35-39	114,379	93,543	81.8
40-44	99,504	82,847	83.3
45-49	85,552	72,043	84.2
50-54	74,546	61,428	82.4
55-59	62,335	50,550	81.1
60+	44,893	23,517	52.4
Total 15+	1,058,197	712,072	66.8

Perhitungan: $LF_{2015} = LFPR_{2010} \times Penduduk_{2015}$

²⁵ Perhitungan ini mengendalikan perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja keseluruhan akibat perubahan dalam komposisi usia dari kelompok usia yang aktif secara ekonomi, namun tidak bagi perubahan yang spesifik usia tertentu dalam tingkat partisipasi angkatan kerja dimana tidak ada metode perkiraan akurat tersedia.

4. Perkirakan **jumlah pekerja miskin dan jumlah pekerja produktif** (tanpa memasukkan pengangguran yang tidak miskin)²⁶ serta **defisit kesempatan kerja produktif** di tahun *baseline* berdasarkan pada formula dalam kotak di atas.
5. Perkirakan **jumlah pengangguran** di tahun sasaran sebagai *target tingkat pengangguran di tahun sasaran x perkiraan angkatan kerja*. Apabila tidak ada target pengangguran spesifik, tingkat pengangguran saat ini dapat digunakan sebagai target minimum, atau skenario-skenario yang berbeda berdasarkan pada tingkat pengangguran yang berbeda dapat dibuat. Dalam kasus Maluku, asumsi target pengangguran sebesar 7.1 persen, sesuai dengan rata-rata nasional pada tahun 2010 diambil. Berdasarkan pada **perkiraan total angkatan kerja di tahun sasaran**, hitunglah perkiraan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja (*employed*) sebagai *perkiraan angkatan kerja minus perkiraan jumlah pengangguran* atau [*estimated labour force minus estimated number of unemployed*]. Hitunglah perubahan selama periode tersebut

Tabel 11 Proyeksi perubahan dalam angkatan kerja– Maluku, 2010-2015

	2010	2015	Perubahan 2010-2015	Perubahan tahunan 2010-2015	% perubahan 2010-2015
Total penduduk	1,533,506				
Penduduk usia kerja	979,005	1,058,197	79,192	15,838	8.1
Angkatan kerja	653,731	712,072	58,341	11,668	8.9
Bekerja	587,677	661,515	73,837	14,767	12.6
Pengangguran	66,054	50,557	-15,496	-3,099	-23.5
Tingkat pengangguran (%)	10.1	7.1	N/A	N/A	N/A
Angka kemiskinan (HPR) (%)	27.7	12.5	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Target untuk 2015 didasarkan pada target MDG untuk menurunkan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015. Target pengangguran sesuai dengan tingkat pengangguran rata-rata nasional pada tahun 2010.

6. Perkirakan jumlah pekerja miskin (penduduk usia kerja yang bekerja [*employed*] x angka kemiskinan [*headcount poverty rate*]), kesempatan kerja produktif (angkatan kerja – pengangguran dan pekerja miskin) dan defisit kesempatan kerja produktif (pekerja miskin + pengangguran **atau** angkatan kerja – kesempatan kerja produktif) untuk tahun sasaran.
7. Hitunglah jumlah kesempatan kerja produktif yang perlu diciptakan guna mencapai target kemiskinan dan pengangguran di tahun akhir sebagai *target kesempatan kerja produktif minus kesempatan kerja produktif di tahun baseline* [*productive employment*

²⁶ The calculation arrives at the number of productively employed, excluding the non-poor unemployed, While this may be a preferred measurement data may not always be available.

target at end-year minus productive employment at baseline year]²⁷. Hal ini akan menginformasikan jumlah peluang kerja yang harus berbentuk pekerjaan baru karena (i) peningkatan dalam angkatan kerja dan (ii) target dalam mengurangi pengangguran. Perubahan dalam jumlah pekerja miskin akan memberitahukan (iii) jumlah pekerjaan yang perlu diperbaharui melalui peningkatan dalam produktivitas dan penghasilan atau diganti oleh pekerjaan lain yang lebih produktif.

Hitunglah **perubahan** antara tahun *baseline* dan tahun sasaran untuk semua indikator guna menganalisa sifat dan skala perubahan dan untuk menguraikan struktur angkatan kerja dalam kaitannya dengan kesempatan kerja produktif vs. defisit kesempatan kerja produktif. Hitunglah penciptaan pekerjaan tahunan selama periode tersebut dan persentase perubahan.

Tabel 12 Perkiraan kebutuhan atas kesempatan kerja produktif - Maluku 2010-2015

	2010	2015	perubahan 2010-2015	perubahan tahunan 2010-2015	% perubahan 2010-2015
Angkatan kerja	653,731	712,072	58,341	11,668	8.9
Pekerja miskin	163,022	82,689	-80,333	-16,066	-49.3
Pengangguran	66,054	50,557	-15,497	-3,099	-23.5
Defisit kesempatan kerja produktif	229,076	133,246	-95,830	-19,166	-41.8
Kesempatan kerja produktif	424,655	578,825	154,170	30,834	36.3

Interpretasi hasil

Tantangan-tantangan dalam mengurangi defisit kesempatan kerja produktif di Maluku haruslah diukur dengan mempertimbangkan konteks angkatan kerja yang tumbuh. Proyeksi pertumbuhan angkatan kerja dan kebutuhan untuk menciptakan kesempatan kerja produktif diberikan dalam **Error! Reference source not found.** dan memberikan gambaran kuantitatif terhadap tantangan dalam memenuhi target pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran yang telah ditetapkan ke tingkat nasional tahun 2010 pada tahun 2015

Total proyeksi kebutuhan untuk kesempatan kerja produktif dapat diuraikan menjadi tiga kategori (i) peningkatan angkatan kerja neto, (ii) penurunan pengangguran dan (iii) penurunan pekerja miskin. (i) and (ii) hanya dapat dicapai melalui penciptaan pekerjaan baru, sementara (iii) dapat dicapai baik melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan dari pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja miskin dan peluang yang memungkinkan pekerja miskin untuk pindah ke pekerjaan lain yang lebih baik.

²⁷ Peningkatan kesempatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran memberikan indikasi jumlah minimum dari kesempatan kerja produktif baru yang perlu diciptakan.

Proyeksi yang diberikan dalam **Tabel 12** menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan produktif yang perlu ditingkatkan adalah setidaknya 154'000 antara tahun 2010 dan 2015, apabila target MDG yang ambisius untuk menurunkan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015 hendak dicapai. Peningkatan ini mencakup para pendatang baru dalam angkatan kerja (58'300), mereka yang perlu dialihkan dari pengangguran sehingga memperoleh pekerjaan (15'500) dan mereka yang perlu pindah dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi (80'300). Dengan kata lain, hampir 74 ribu pekerjaan perlu diciptakan (58.3+15.5) dan setidaknya 80 ribu pekerjaan harus diperbaharui dalam hal produktivitasnya atau diganti dengan pekerjaan lain guna mencapai target-target ini.

4.2.2 Membandingkan proyeksi terhadap kinerja masa lalu

Guna menghargai skala tantangan ini, perkiraan tersebut perlu disandingkan dengan kinerja masa lalu dalam perekonomian dan bursa kerja Maluku. Untuk tujuan ini, tren bursa kerja masa lalu dan penurunan kemiskinan haruslah dikaji. Tahun terdahulu dimana informasi yang diperlukan tersedia, perlu diidentifikasi dan dilakukan perhitungan yang sama untuk periode tersebut.

Data yang diperlukan untuk satu atau beberapa tahun sebelumnya

- Penduduk usia kerja
 - Angkatan kerja
 - Kesempatan kerja
 - Pengangguran
 - Angka kemiskinan (*headcount poverty rate*)
8. Tariklan informasi mengenai **penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk usia kerja yang bekerja, pengangguran** dan **angka kemiskinan** di tahun terdahulu dan mengumpulkan informasi ini bersama dengan informasi yang sama untuk tahun *baseline*. Hitunglah tingkat pengangguran, jumlah pekerja miskin, kesempatan kerja produktif dan defisit kesempatan kerja produktif untuk tahun terdahulu tersebut.
 9. Hitunglah perubahan antara tahun *baseline* dan tahun terdahulu tersebut serta persentase perubahan selama periode tersebut.

Tabel 13 Karakteristik angkatan kerja– Maluku (dalam 000)

			perubahan tahunan	% perubahan
	2002	2010	n 2002- 2010	2002- 2010
Penduduk usia kerja	737,887	979,005	241,118	32.7
Angkatan kerja	484,205	653,731	169,526	35.0

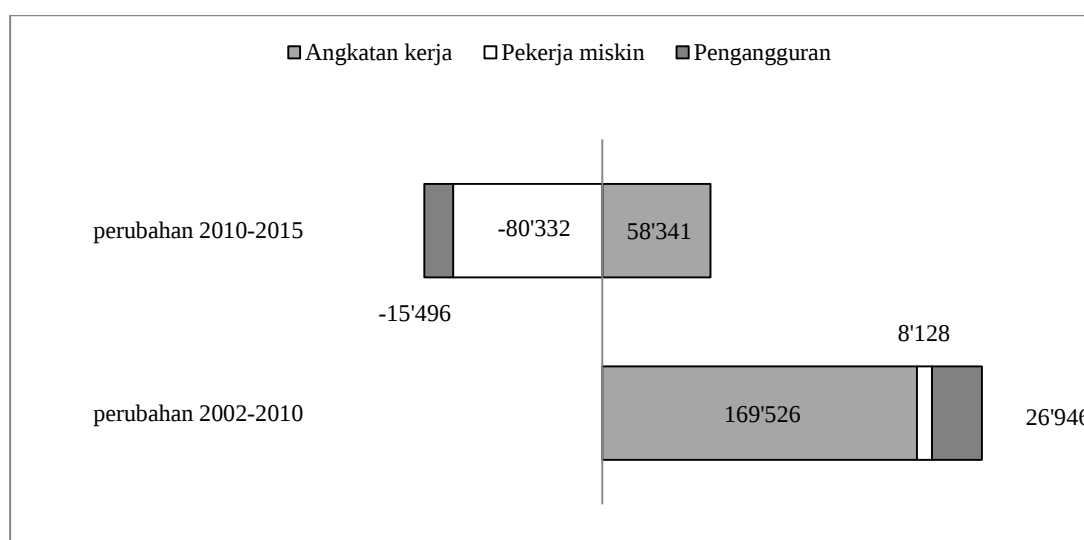
Bekerja	445,097	587,677	142,580	17,823	32.0
Pengangguran	39,108	66,054	26,946	3,368	68.9
Tingkat pengangguran (%)	8.1	10	N/A	N/A	N/A
Angka kemiskinan (%)	34.8	27.7	N/A	N/A	N/A
Pekerja miskin	154,894	163,022	8,128	1,016	5.2
Kesempatan kerja produktif	290,203	424,655	134,452	16,807	46.3
Defisit kesempatan kerja produktif	194,002	229,076	35,074	4,384	18.1

Sumber: dibandingkan dengan tabel-tabel sebelumnya

Keterangan: Dalam kasus Indonesia secara keseluruhan, kita menggunakan angka kemiskinan atau *headcount poverty rate* (HPR) berdasarkan pada garis kemiskinan nasional.²⁸ Mengambil garis kemiskinan internasional, proporsi penduduk yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari 1 dolar AS sehari menurun cukup drastis dari 20.6% pada tahun 1990 menjadi 5.9% pada tahun 2008, berarti bahwa target MDG 2015 dalam mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 10.3% telah berhasil dicapai.

10. Sistesisikan temuan.

Gambar 7 Target ketenagakerjaan diuraikan (dalam 000)



Interpretasi hasil

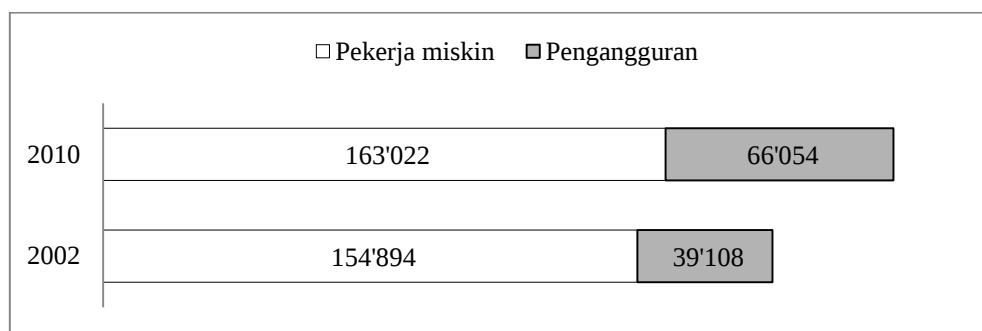
Tabel yang dihasilkan di atas menyediakan pemahaman mengenai sifat perubahan dalam kesempatan kerja produktif serta defisit kesempatan kerja produktif yang berwujud pengangguran atau pekerja miskin.

²⁸ Garis kemiskinan nasional adalah sebesar 1.50 dolar AS PPP (Paritas daya beli) dan metode menghitung garis kemiskinan diadaptasi dan diubah pada tahun 1998 dengan memperbaiki kualitas barang-barang non-pangan. Merujuk kepada *Report on the Achievement of the Millennium Development Goals Indonesia 2010* (Bappenas, 2010)

Tabel 13 menunjukkan karakteristik angkatan kerja Maluku pada tahun 2002 dan 2010. Angka-angka kesempatan kerja telah meningkat lebih dari 32 persen, sementara pengangguran meningkat sebesar 69 persen selama periode 2002 – 2010. Walaupun terdapat peningkatan tajam dari pengangguran, angka kemiskinan mencatat penurunan sebesar 7.1 poin persentase, yang menunjukkan bahwa pengangguran bukanlah mereka yang miskin. Tentunya, dengan tidak adanya sistem jaminan sosial yang baik tidak mampu untuk tidak memiliki pekerjaan.

Tabel 13 menunjukkan bahwa peningkatan dalam angkatan kerja didampingi dengan peningkatan tajam dalam kesempatan kerja produktif sebesar 46 persen selama periode tersebut. Peningkatan tersebut dicatat walaupun terdapat pertumbuhan jumlah pekerja miskin, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang kuat.

Gambar 8 Defisit kesempatan kerja produktif, Maluku (in 000)



Dalam periode 2002-2010, angkatan kerja Maluku telah tumbuh sebesar 35 persen setiap tahunnya, yaitu lebih dari 21 ribu orang. Dalam periode lima tahun 2010-2015, namun, angkatan kerja diharapkan untuk tumbuh sekitar 12 ribu orang per tahunnya (**Tabel 12**), yang mungkin akan meringankan tekanan pada bursa kerja untuk menciptakan pekerjaan bagi pendatang baru kedalam angkatan kerja.

Pada dasawarsa sebelumnya, jumlah penduduk usia kerja yang bekerja produktif meningkat sebesar 17 ribu per tahunnya (**Tabel 13**). Namun dalam tahun-tahun mendatang menuju 2015, laju peningkatan kesempatan kerja produktif perlu digandakan guna memenuhi target-target penurunan kemiskinan dan pengangguran: Setidaknya 30 ribu pekerjaan akan perlu diciptakan setiap tahunnya antara tahun 2010 dan 2015 (**Tabel 12**).

Penurunan jumlah pekerja miskin harus menjadi fokus strategi pembangunan di tahun-tahun mendatang. Sekitar 80 ribu pekerjaan perlu dihasilkan, baik melalui peningkatan produktivitas secara signifikan maupun pendapatan dari pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja miskin atau memungkinkan pekerja miskin tersebut untuk mengakses pekerjaan lain yang lebih baik dan lebih produktif. Sekitar 3.4 juta pekerjaan tambahan per tahunnya perlu diciptakan pada tahun 2010-2015 guna mencapai target pengangguran 7.1 persen.

4.3 Pengenalan terhadap perangkat lunak berbasis excel

Metode yang digunakan untuk menghitung defisit kesempatan kerja produktif dan menetapkan target ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan alat penentuan target ketenagakerjaan yang merupakan lembar sebar-makro (*macro-spread sheet*) berbasis Excel, yang memungkinkan para pengguna untuk menguraikan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja pada dua periode berturut-turut, dalam komponen kesempatan kerja “produktif” dan “defisit kesempatan kerja produktif” pada level agregat.

Instruksi:

Untuk menggunakan alat ini, unduh dan buka di computer Anda, kemudian simpan sesegera mungkin dengan nama tersendiri sebagai sebuah berkas Excel. Isilah lembar “data” dan klik tombol “generate”. Tabel-tabel utama akan secara otomatis dihasilkan.

Catatan: Anda mungkin harus mengaktifkan macros guna menjalankan program dalam Microsoft Excel 2007. Ketika membuka berkas (*file*) tersebut, sebuah peringatan keamanan mungkin muncul di atas lembar sebar memberitahukan pengguna bahwa macros telah dinonaktifkan. Klik tombol “options” pada panel informasi dan kemudian pilih “enable this content” untuk melewati peringatan keamanan tersebut.

Tujuan dari alat ini adalah untuk memahami defisit kesempatan kerja produktif dengan menguraikan angkatan kerja dari sudut pandang kemiskinan serta untuk memperoleh target-target atas kesempatan kerja produktif. Alat ini bertujuan untuk menjawab antara lain pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: i) Apa komposisi angkatan kerja terkait dengan kesempatan kerja produktif vs. defisit kesempatan kerja produktif? Apa proporsi pengangguran/ pekerja miskin dalam defisit kesempatan kerja produktif? (ii) Apa yang telah berubah selama beberapa tahun tersebut? Apakah perubahan tersebut disertai dengan peningkatan dalam kualitas dan/atau kuantitas pekerjaan? (iii) Berdasarkan pada target kemiskinan dan/atau pengangguran, apa proyeksi kebutuhan atas penciptaan kesempatan kerja produktif untuk tahun-tahun mendatang? Apakah perkiraan ini sejalan dengan kinerja masa lalu?

Alat sederhana ini bermanfaat untuk membuat perkiraan di tingkat agregat serta disagregasi berdasarkan jenis kelamin dan selain itu memberikan cakupan untuk analisis mendalam lebih jauh lagi. Kajian-kajian sektor dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari analisis ini guna mengidentifikasi potensi-potensi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja di sektor-sektor berbeda. Namun, ini harus dilengkapi dengan analisis spesifik sektor guna memahami kendala terhadap kesempatan kerja produktif. Contohnya, penentuan target ketenagakerjaan sesuai dibawah kerangka analisis yang lebih luas terhadap analisis diagnostik ketenagakerjaan yang menggunakan pendekatan kendala yang mengikat guna mengidentifikasi kendala dan tantangan yang paling serius dalam meningkatkan kesempatan kerja produktif.²⁹ Terkait dengan ini, target-target ketenagakerjaan dapat

²⁹ Panduan koseptual dan metodologi terhadap analisis diagnostik ketenagakerjaan (Jenewa: ILO, akan datang).

memberitahukan kepada kita bagaimana target-target ini dapat dicapai dan yang mana yang paling relevan terkait dengan kendala yang ditemukan. Sebaliknya, kita juga dapat melihat kendala yang perlu diatasi terkait dengan target-target yang telah ditetapkan.

Tabel dan grafik yang disajikan di atas diambil langsung dari alat Excel tentang penentuan target ketenagakerjaan menggunakan data dari Bangladesh dan Maluku, dan menjadi contoh kasus mengenai bagaimana melakukan analisa.

5. Meningkatkan level analisis

Analisis yang lebih rinci dari data berbasis survei memungkinkan kita untuk melonggarkan beberapa asumsi yang tersirat dalam model dasar yang disederhanakan, seperti asumsi bahwa rasio ketergantungan dalam rumah tangga sama antara rumah tangga miskin dan tidak-miskin, serta memperoleh gambaran yang lebih rinci terhadap pekerja miskin dan pengangguran. Survei penghasilan rumah tangga, yang juga disebut sebagai survei sosial ekonomi rumah tangga, menjadi sumber data untuk analisis rinci semacam itu, karena survei tersebut mencakup informasi atas pendapatan dan konsumsi, serta komposisi demografi rumah tangga dan atas pekerjaan.³⁰ Di negara-negara berkembang, survei-survei ini umumnya menjadi landasan untuk penilaian kemiskinan yang secara rutin dibuat oleh Bank Dunia dan pemetaan serta analisis kemiskinan lainnya.

Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam memanfaatkan dan menggunakan informasi dari survei-survei semacam itu. Akses ke data primer memungkinkan dilakukannya tabulasi silang yang lebih rinci ataupun yang dibuat khusus untuk sejumlah besar variabel. Namun, ini bisa jadi memakan waktu dan memerlukan investasi tinggi di awal serta upaya untuk memperoleh pengetahuan mendalam dari data tersebut serta kekuatan, kelemahan dan keterbatasannya. Pendekatan alternatif adalah untuk mendasarkan analisa tersebut pada tabulasi yang siap pakai seperti yang disajikan dalam penilaian kemiskinan dan publikasi lainnya berdasarkan pada data survei. Keterbatasan utama dari pendekatan ini jelas sekali bahwa seseorang terbatas pada hasil survei yang dihasilkan dan diberikan oleh orang lain. Keterbatasan utama dari mendasarkan analisis pada hasil survei seperti yang diberikan dalam publikasi adalah bahwa informasi mengenai data ketenagakerjaan seringkali hanya disediakan untuk kepala rumah tangga. Kelemahan umum lainnya dari mendasarkan analisis pada survei pendapatan-pengeluaran atau sosial ekonomi rumah tangga adalah bahwa informasi yang dikumpulkan mengenai ketenagakerjaan biasanya tidak serinci dibandingkan informasi dari survei angkatan kerja dan tidak selalu berdasarkan pada standar dan konsep internasional. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam menggabungkan data dari berbagai tipe survei yang berbeda.

5.1 Memasukkan penyebab kemiskinan lainnya kedalam model

Kelemahan yang paling serius dari model dasar yang disederhanakan di atas adalah asumsi bahwa rasio ketergantungan dalam rumah tangga itu sama antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Dengan kata lain, rasio antara anggota keluarga yang tidak bekerja dan yang bekerja secara rata-rata sama dalam rumah tangga miskin dan tidak miskin. Asumsi ini pada kenyataannya jarang terjadi karena semakin sedikit pencari nafkah dan semakin banyak orang yang perlu diberi makan, maka semakin tinggi pendapatan yang perlu dibawa pulang oleh

³⁰ Survei semacam ini disebut dengan nama yang berbeda-beda dan seringkali tersamarkan. Pada tahun 1980-an, Bank Dunia mengembangkan sebuah konsep Survei Pengukuran Standar Hidup atau *Living Standards Measurement Surveys* (LSMS) yang komprehensif, yang diterapkan secara meluas di Negara-negara berkembang pada dasawarsa-dasawarsa berikutnya (lihat ke www.worldbank.org, cari LSMS).

tiap pencari nafkah agar rumah tangga tersebut bisa mempertahankan tingkat konsumsi di atas garis kemiskinan. Kemiskinan juga mungkin disebabkan oleh menganggur dan kurangnya kemampuan untuk bekerja. Oleh karena itu, seringkali jumlah riil pekerja miskin lebih rendah daripada perkiraan yang diperoleh dari model dasar yang diuraikan di atas. Namun, seperti yang dibahas sebelumnya, model yang disederhanakan tersebut menyediakan perkiraan yang akurat terhadap pekerja miskin di negara-negara yang kurang berkembang. Di negara-negara berpenghasilan menengah, seperti contohnya negara-negara Amerika Tengah, situasinya bisa jadi berbeda, mencerminkan fakta bahwa ada penyebab lain dari kemiskinan, selain dari imbal balik yang rendah atas pekerjaan yang dilakukan.³¹

Membandingkan perkiraan jumlah pekerja miskin, yang didasarkan pada asumsi bahwa rasio ketergantungan dalam rumah tangga itu sama pada rumah tangga miskin dan tidak miskin, dengan jumlah pekerja miskin aktual juga dapat memberikan wawasan yang penting kedalam sifat dari kemiskinan yang ada. Dalam situasi-situasi dimana kesenjangannya kecil antara angka perkiraan dengan aktual, mis. di sebagian besar negara-negara di Afrika Sub-sahara dan negara-negara kurang berkembang lainnya (lihat Table 2), maka kita dapat berasumsi bahwa penyebab utama kemiskinan adalah imbal balik yang rendah bagi para pekerja (penghasilan rendah) dan bahwa menciptakan peluang bagi orang yang hidup dalam kemiskinan untuk dapat mengakses pekerjaan yang lebih produktif harus menjadi inti dari segala upaya agar dapat berhasil mengurangi kemiskinan. Formula yang disederhanakan kemudian menjadi perhitungan, yang memberikan hasil yang paling mendekati terhadap jumlah pekerja miskin, yang baik serta memberikan perkiraan terhadap besarnya kebutuhan penciptaan kesempatan kerja produktif guna memenuhi target kemiskinan.

Namun, dalam situasi dimana perkiraan jumlah pekerja miskin ternyata jauh lebih tinggi daripada jumlah aktualnya (karena asumsi kunci bahwa rasio ketergantungan dalam rumah tangga adalah sama untuk rumah tangga miskin dan tidak miskin tidak valid), maka kemungkinan ada tiga penyebab utama kemiskinan yang dapat menjelaskan kesenjangan, besaran relatif dan sifat kemiskinan yang akan menentukan gabungan dari solusi dan kebijakan yang berbeda apa yang dibutuhkan:

1. Tingginya pengangguran dalam angkatan kerja dalam rumah tangga miskin;
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah antara anggota rumah tangga miskin yang merupakan penduduk usia kerja;
3. Proporsi anak-anak dan lansia yang cukup tinggi dan proporsi yang rendah dari anggota rumah tangga miskin yang merupakan penduduk usia kerja (struktur demografi).

³¹ Perkiraan oleh El Observatorio del Empleo in San José, Kosta Rika menemukan bahwa jumlah pekerja miskin yang diperkirakan oleh formula yang disederhanakan melebihi jumlah actual sebesar 15-18 persen di Panama dan El Salvador, namun hanya 5 persen di Honduras.

5.1.1 Pengangguran dan kemiskinan

Tingkat pengangguran keseluruhan memberikan indikasi awal apakah pengangguran tersebut kemungkinan merupakan penyebab utama dari kemiskinan. Dalam situasi dimana tingkat pengangguran keseluruhan tersebut rendah dan kesenjangan antara tingkat pengangguran antara rumah tangga miskin dan tidak miskin itu kecil, kemungkinan tidak ada analisis lebih lanjut dari faktor ini yang perlu dilakukan.

Namun, dalam situasi-situasi dimana tingkat pengangguran tinggi dalam rumah tangga miskin, hal ini akan memerlukan tidak hanya fokus pada penciptaan kesempatan kerja produktif, namun juga perlindungan sosial dan langkah-langkah untuk memudahkan akses ke pekerjaan produktif bagi pengangguran.

5.1.2 Menanggapi tingkat partisipasi yang rendah dalam angkatan kerja

Tingkat partisipasi yang rendah antara anggota rumah tangga miskin yang berada dalam usia kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala waktu akibat pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu, disabilitas yang mengganggu kapasitas untuk bekerja, atau keputusan. Analisis responsif gender berdasarkan pada data-data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin diperlukan dan perhatian khusus harus diberikan pada tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah diantara perempuan, yang mungkin disebabkan oleh kerja-kerja rumah tangga dan tugas merawat anak yang memakan waktu dan tidak dibagi rata, dan juga akses ke bursa kerja yang mungkin tidak sama.

Dalam situasi-situasi dimana tingkat partisipasi perempuan rendah dalam angkatan kerja dan/atau dimana tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan berbeda jauh, intervensi sebaiknya diarahkan untuk memungkinkan para perempuan dalam rumah tangga miskin memperoleh pekerjaan produktif yang dapat menjadi cara yang khususnya efektif dalam menurunkan kemiskinan serta jumlah pekerja miskin. Langkah-langkah ini harus diarahkan untuk memudahkan masuknya mereka kedalam angkatan kerja dan aksesnya ke pekerjaan produktif, yang dilengkapi dengan sistem perlindungan sosial.

5.1.3 Kekurangan sumber daya manusia (tenaga kerja)

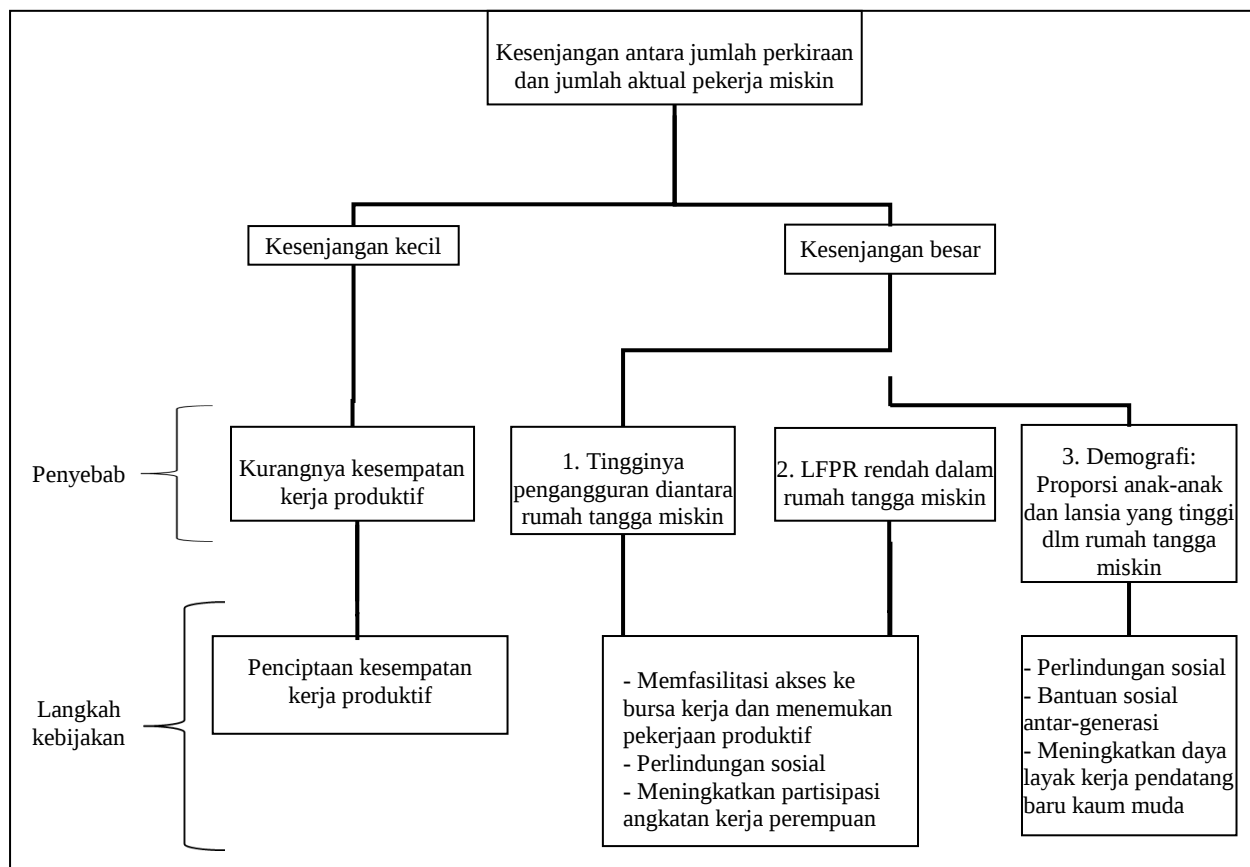
Kurangnya tenaga kerja, berlawanan dengan kurangnya peluang kesempatan kerja produktif, mengindikasikan kekurangan sumber daya manusia (tenaga kerja) dalam rumah tangga dan terkait erat dengan struktur demografi rumah tangga. Proporsi anak-anak dan lansia yang tinggi serta proporsi yang rendah dari anggota keluarga yang berada pada usia kerja dalam rumah tangga mengindikasikan kekurangan sumber daya pekerja yang absolut. Namun, kurangnya sumber daya pekerja juga dapat diterjemahkan, daripada kenyataannya, dalam

situasi dimana tingkat partisipasi angkatan kerja rendah diantara anggota keluarga yang berada pada usia kerja.

Apabila kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh proporsi anak-anak dan lansia yang cukup tinggi dan kurangnya sumber daya pekerja, maka bantuan sosial antar-generasi (mis. tunjangan anak, pensiun) dan perlindungan sosial umumnya harus menjadi instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan. Mempersiapkan pendatang muda untuk mengakses bursa kerja dengan meningkatkan daya layak kerja mereka juga terbukti menjadi sebuah prioritas dalam jangka menengah/ panjang.

Tiga penyebab kemiskinan yang berbeda dijelaskan di atas perlu diselesaikan dan dipahami, dan kebutuhan terkait dengannya perlu dikaji karena memerlukan respon-respon kebijakan yang berbeda-beda. Skema di bawah (**Gambar 9**) menyatukan sumber-sumber kemiskinan yang berbeda serta langkah-langkah kebijakan yang tersirat.

Gambar 9 Penyebab kemiskinan dari perspektif ketenagakerjaan



Bosnia & Herzegovina: kebutuhan untuk menanggapi persoalan pekerja miskin, pengangguran dan partisipasi angkatan kerja perempuan

Kasus Bosnia dan Herzegovina adalah ilustrasi sebuah situasi dimana terdapat tingkat pekerja miskin yang cukup tinggi bersamaan dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah, dimana kemiskinan merupakan hasil dari gabungan ketiga faktor.

Tabel 14 menunjukkan bahwa defisit kesempatan kerja produktif terutama berwujud sebagai pengangguran, walaupun juga jumlah pekerja miskin cukup tinggi. Pada tahun 2007, tingkat pengangguran amat tinggi yaitu 29 persen, dimana pekerja miskin merupakan 12 persen dari total angkatan kerja.

Tabel 14 Klasifikasi angkatan kerja dan kemiskinan di BiH, 2007

Dalam 000	Miskin	Tidak miskin	Total
Bekerja	139	711	850
Pengangguran	93	254	347
Total	232	965	1196
In percent	Miskin	Tidak miskin	Total
Bekerja	11.7	59.4	71.1
Pengangguran	7.8	21.2	29.0
Total	19.4	80.7	100.0

Sumber: LFS (Survei Angkatan Kerja) 2007; HBS 2007

Perhitungan: Jumlah yang bekerja dan pengangguran miskin dan tidak miskin berdasarkan pada jumlah kepala keluarga yang miskin berdasarkan status bursa kerja (HBS 2007)

Tingkat keparahan persoalan pengangguran digarisbawahi oleh fakta bahwa terdapat korelasi positif antara kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2007, jumlah kemiskinan diantara rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang menganggur adalah 27 persen, dibandingkan dengan 16 persen diantara rumah tangga dimana kepala rumah tangganya masih bekerja (**Tabel 15**). Pengangguran lebih berdampak bagi kaum miskin karena 15 persen dari penduduk miskin menganggur dibandingkan dengan kurang dari 10 persen dari penduduk tidak miskin menganggur.

Fakta bahwa 22 persen rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang yang bukan merupakan pensiunan, namun masih tidak aktif, sementara 16 persen rumah tangga dengan kepala rumah tangganya bekerja masih merupakan rumah tangga miskin dengan jelas menunjukkan ketidakaktifan, sama seperti pengangguran, adalah sumber kemiskinan (**Tabel 15**).

Persoalan kurangnya pekerjaan kemudian semakin ditekankan oleh tingkat partisipasi yang sangat rendah dalam angkatan kerja, khususnya diantara para perempuan (**Tabel 16**). Hanya sedikit lebih tinggi dari setengah penduduk usia kerja³² yang berpartisipasi dalam angkatan kerja pada tahun 2007 dan hanya dua dari lima orang yang benar-benar bekerja.³³

Terdapat perbedaan gender yang besar dalam partisipasi angkatan kerja dan dalam akses ke pekerjaan.³⁴ Pada tahun 2007 sekitar 40 persen dari perempuan usia kerja berpartisipasi dalam angkatan kerja, kurang dari 30 merupakan angkatan kerja perempuan yang benar-benar bekerja dan lebih dari 60

³² Definisi penduduk usia kerja disini adalah mereka yang berusia 15-64 tahun.

³³ Data berikutnya menunjukkan bahwa angka-angka ini tidak semakin baik sejak tahun 2007.

³⁴ Statistik tidak memungkinkan dilakukannya analisis disagregasi apapun terhadap akses ke pekerjaan produktif berdasarkan jenis kelamin.

persen tidak aktif. Komposisi terkait diantara laki-laki usia kerja adalah 67 dan 54 dan 33 persen. Analisis yang lebih rinci mengenai kesenjangan gender dalam bursa kerja mengindikasikan persoalan dalam mengakses bursa kerja tersebut (seperti kurangnya sumber daya dan informasi mengenai kesempatan kerja atau peluang untuk berusaha sendiri), selain itu juga fasilitas penitipan anak serta sistem pendidikan yang tidak memadai, yang semakin memperkuat peran-peran tradisional laki-laki dan perempuan serta peran pekerja berdasarkan gender.³⁵

Tabel 15 Distribusi dan proporsi rumah tangga menurut status kemiskinan mereka berdasarkan status aktivitas dari kepala rumah tangga, 2007. Persentase

	Distribusi		Proporsi	
	Poor	Non Poor	Poor	Non poor
Total	100.0	100.0	18.6	81.4
Bekerja	40.0	46.4	16.4	83.6
Pengangguran	15.0	9.3	26.8	73.2
Pensiunan	28.4	31.0	17.3	82.7
Lainnya	16.7	13.3	22.2	77.8

Sumber: Survei Anggaran Rumah Tangga BiV (The BiH Household Budget Survey) 2007

Pada tahun 2007, pengangguran kaum muda mencapai 59 persen (**Tabel 16**), dan hanya 18 persen laki-laki muda dan 9 persen perempuan muda yang bekerja.³⁶ Tingkat aktivitas yang sangat rendah diantara kaum muda sebagian dapat dijelaskan oleh fakta bahwa banyak yang melanjutkan studinya pada usia dua puluh tahunan dan memasuki bursa kerja di kemudian waktu, namun tingkat pengangguran yang sangat tinggi diantara kaum muda mengindikasikan kurangnya pekerjaan bagi pendatang muda dan ketidaksesuaian antara keterampilan yang ada dan kebutuhan bursa kerja. Jelas sekali, kaum muda sangat kesulitan memasuki bursa kerja.

Tabel 16 Partisipasi dalam angkatan kerja berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di BiH, 2007

Usia	15-24	25-49	50-64	15-64	15+
Aktivitas	33	67	39	52	44
Laki-laki	41	84	55	67	58
Perempuan	26	50	24	38	31
Bekerja	14	49	32	37	31
Laki-laki	18	64	45	54	42
Pengangguran	9	34	20	25	21
Pengangguran	59	27	18	30	29
Laki-laki	55	24	18	27	27
Pengangguran	62	32	16	34	33
Tidak aktif	67	33	61	48	56
Laki-laki	59	16	45	33	42
Perempuan	74	50	76	62	69

Sumber : LFS (Survei Angkatan Kerja) 2007

³⁵ *Gender Inequalities in the Labour Market: Bosnia and Herzegovina* (Jenewa: ILO, akan datang)

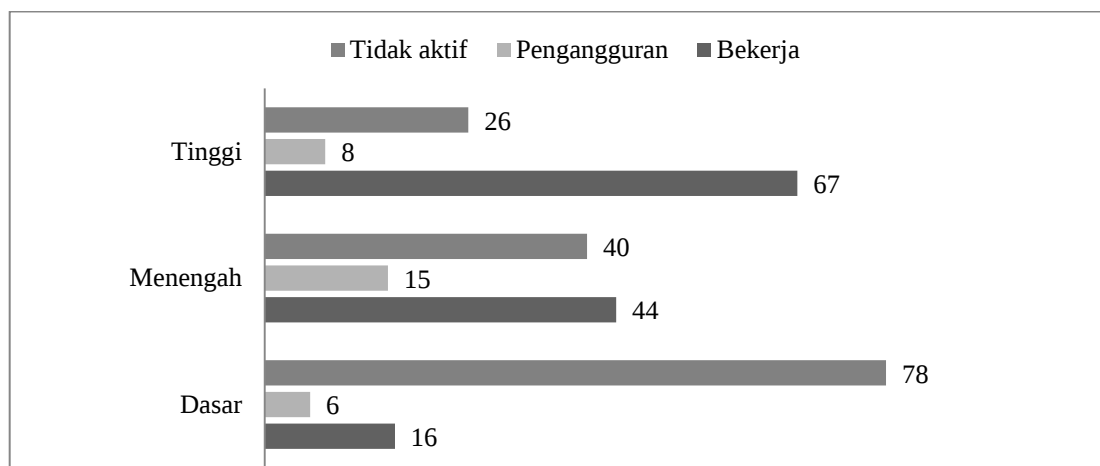
³⁶ Situasi ini kemudian sedikit membaik. Pada tahun 2009, pengangguran kaum muda menurun drastis menjadi 49 persen.

Meskipun demikian, terdapat relasi yang amat erat antara tingkat pendidikan, tingkat kesempatan kerja dan terpaan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja perlu dilengkapi dengan langkah-langkah yang sama kuatnya, yang ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya layak kerja dan tingkat, kualitas serta relevansi pendidikan.

Pada tahun 2008³⁷, hampir 80 persen dari penduduk usia kerja dengan pendidikan dasar atau kurang dari itu bersifat tidak aktif dan hanya 15 persen yang bekerja (**Gambar 10**). Jumlah pengangguran yang kecil diantara mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar adalah karena keputusan yang meluas, yang berakar dari rendahnya daya layak kerja dari orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan berakibat pada tingginya tingkat ketidakaktifan.³⁷ Sebaliknya, tingkat kesempatan kerja bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi adalah 67 persen dan mereka yang memiliki pendidikan menengah adalah 38 persen. Perbedaan-perbedaan ini bahkan lebih kentara diantara perempuan dibandingkan laki-laki, menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan perempuan sangatlah penting untuk meningkatkan akses mereka ke pekerjaan.

Kemiskinan juga erat terkait dengan tingkat pendidikan. Pada tahun 2007, sepertiga dari semua rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dengan tingkat pendidikan tidak lebih dari pendidikan dasar adalah rumah tangga miskin, dibandingkan dengan 'hanya' 15 persen rumah tangga dimana kepala rumah tangganya yang setidaknya memiliki pendidikan menengah.

Gambar 10 Partisipasi penduduk usia kerja dalam bursa kerja berdasarkan tingkat pendidikan (% dari WAP, 2007)



Dalam situasi dimana rasio ketergantungan dalam rumah tangga kurang baik – karena alasan-alasan yang dijelaskan di atas – merupakan penyebab penting dari kemiskinan, mengurangi jumlah pekerja miskin tidak akan cukup untuk mengurangi kemiskinan secara efektif. Namun, seperti yang diilustrasikan dalam **Error! Reference source not found.** dari bagian sebelumnya, sebuah kombinasi langkah-langkah kebijakan diperlukan.

Dalam kasus Bosnia dan Herzegovina, kombinasi dari target-target kesempatan kerja dan bursa kerja, terkait dengan mengurangi pengangguran, meningkatkan tingkat partisipasi

³⁷ Khare S., Ronnas P., Shamchiyeva L. *Employment diagnostic analysis : Bosnia and Herzegovina* (Jenewa: ILO, 2011)

angkatan kerja dan meningkatkan pendapatan dari pekerjaan dalam rumah tangga miskin diperlukan. Sama halnya dalam kasus di negara lain pada tingkat pembangunan yang sama, walaupun kombinasi yang tepat dari target-target tersebut pastinya beragam dari satu negara ke negara lain, bergantung pada sifat spesifik dari penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, sementara fokus pada peningkatan peluang kerja produktif bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan tetap menjadi inti dan dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk sebuah target umum, namun sejauh mana ini harus dicapai melalui peningkatan produktivitas dan imbal balik ke tenaga kerja diantara pekerja miskin atau melalui penciptaan peluang kerja produktif untuk anggota rumah tangga miskin yang tidak bekerja akan beragam.

Di negara seperti Bosnia dan Herzegovina, meningkatkan tingkat kesempatan kerja juga akan sangat membantu mengurangi kemiskinan. Dengan lebih banyak orang yang bekerja, rasio ketergantungan dalam rumah tangga akan menjadi lebih baik dan pendapatan yang diperlukan oleh masing-masing pencari nafkah untuk mengangkat dirinya dan keluarganya keluar dari kemiskinan akan semakin berkurang.

Mengingat seringnya perbedaan berbasis gender yang besar dalam akses ke pekerjaan, alasan yang kuat dapat dibuat untuk menentukan target-target kesempatan kerja berdasarkan jenis kelamin tertentu. Sama halnya, sebuah target khusus untuk mengurangi pengangguran kaum muda akan sangat disarankan. Namun, seperti yang ditunjukkan kasus Bosnia dan Herzegovina, tantangan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan meningkatkan jumlah pekerjaan dalam ekonomi, tapi juga meningkatkan produktivitas dan imbal balik ke tenaga kerja.

5.2 Menanggapi tujuan ganda menurunkan kemiskinan dan pengangguran

Seperti yang digambarkan dalam kasus Bosnia dan Herzegovina di atas, tingkat pengangguran dan partisipasi yang rendah dalam angkatan kerja karena keputusan atau faktor-faktor penghambat lainnya dapat menjadi penyebab kemiskinan yang penting bersamaan dengan pendapatan yang tidak memadai dari pekerjaan (kemiskinan walaupun bekerja). Namun, pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sejalan. Kasus Provinsi Maluku di Indonesia adalah sebuah gambaran situasi dimana kemiskinan terutama dihasilkan dari produktivitas dan pendapatan yang rendah dari pekerjaan, namun korelasi antara kemiskinan dan pengangguran cukup lemah. Oleh karenanya, guna mencapai tujuan kesempatan kerja produktif dan sepenuhnya serta pekerjaan yang layak untuk semua maka dibutuhkanlah dua hal yaitu, baik pengurangan jumlah pekerja miskin dan pengurangan pengangguran melalui sebuah kombinasi langkah-langkah kebijakan.

Tingkat kemiskinan Maluku (27.7 persen pada tahun 2010) merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dan dua kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional (13.3 persen pada tahun 2010). Tingkat pengangguran berada pada angka persen pada tahun 2010, yang juga lebih tinggi daripada rata-rata negara sebesar 7.1 persen. Walaupun kekurangan akses ke data mikro dari survei pendapatan

pengeluaran rumah tangga menghalangi perhitungan yang akurat terhadap jumlah pekerja miskin dan jumlah serta proporsi yang miskin dan tidak miskin diantara pengangguran yang ada, sebuah analisis terhadap karakteristik utama dari pengangguran dan kepala rumah tangga memperjelas bahwa kedua hal ini adalah dua kategori yang sangat berbeda.

Seperti yang jelas ditunjukkan dari **Tabel 17**, hanya sedikit penduduk miskin yang menganggur: hanya 2.2 persen dari penduduk miskin yang tidak memiliki pekerjaan pada saat survei dilakukan. Sebanyak 97.8 persen dari penduduk miskin bekerja dan hampir 82 persen dari semua penduduk miskin tersebut bekerja di sektor pertanian. Mengingat bahwa pertanian adalah sumber utama kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan – sebanyak 79 persen dari penduduk pedesaan yang bekerja dipekerjakan di sektor pertanian – dapat disimpulkan bahwa daerah pedesaan, manifestasi utama dari defisit kesempatan kerja produktif adalah pekerja miskin dan produktivitas yang rendah dalam pertanian. Namun, di daerah perkotaan, defisit kesempatan kerja produktif khususnya merupakan persoalan tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dianggap cukup tinggi di daerah perkotaan (16 persen) daripada di daerah pedesaan (8.6 persen), walaupun dalam angka, lebih banyak pengangguran di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan.

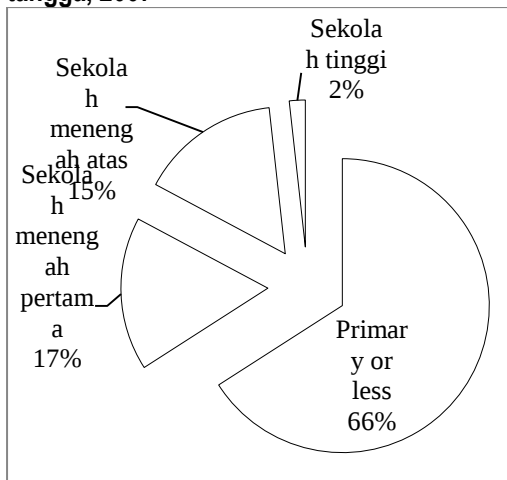
Tabel 17 Angkatan kerja dan penduduk miskin berdasarkan sektor dan status bursa kerja, 2009. Persentase.

	Pengangguran	Bekerja di pertanian	Bekerja di non-pertanian	Total
Total LF (Ang. Kerja)	10.6	50.3	39.1	100
Yang miskin dalam LF	2.2	81.7	16.1	100

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Data centres and employment information), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id>; Data dan Informasi Kemiskinan, Kabupaten / Kota 2009, Badan Pusat Statistik 2009 (selanjutnya disebut BPS).

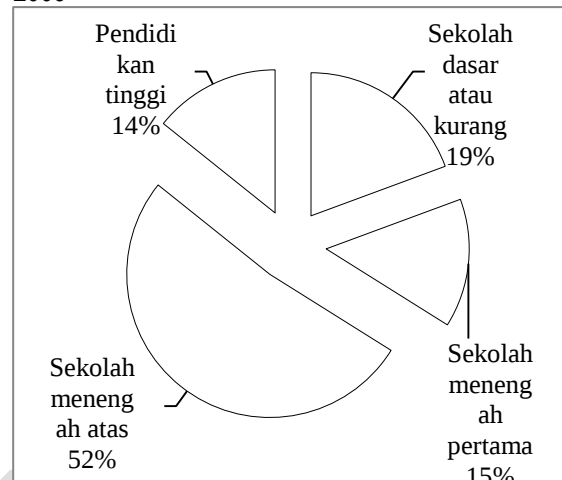
Terdapat kaitan erat antara kemiskinan dan tingkat pendidikan di Maluku: semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, semakin tidak miskin (**Gambar 11**). Pada tahun 2007, sebanyak dua per tiga rumah tangga miskin dikepalai oleh seseorang yang memiliki pendidikan tidak lebih dari pendidikan dasar. Menyelesaikan sekolah menengah mengurangi tingkat kemiskinan hanya 2 persen. Sebaliknya, pengangguran lebih banyak mempengaruhi mereka yang berpendidikan cukup baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pada tahun 2009, dua dari tiga pengangguran telah menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih, dan hanya 19 persen yang hanya memiliki pendidikan menengah atau kurang (**Gambar 12**). Memang, tingkat pengangguran antara mereka yang memiliki ijazah sekolah menengah atas atau lebih adalah 51.8 persen, dibandingkan dengan hanya 19.4 persen diantara mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar atau kurang.

Gambar 11 Distribusi rumah tangga miskin berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, 2007



Sumber: Trends of the Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia, hal. 51, BPS, 2009

Gambar 12 Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, 2009



Sumber: Labour Force Situation in Indonesia (selanjutnya disebut LFS), Agustus 2009 (hal. 35; hal. 45; hal.130), BPS, 2010

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi dua manifestasi dari defisit kesempatan kerja produktif – pekerja miskin dan pengangguran – harus memiliki dua fokus di Maluku: (i) meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari penduduk miskin di pedesaan, dengan fokus yang kuat di daerah pedesaan dan pertanian, dan (ii) menciptakan peluang kerja produktif baru bagi pengangguran baik daerah pedesaan maupun perkotaan, dengan fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tingkat pendidikan menengah atau lebih tinggi. Mempertimbangkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah diantara kaum muda dan perempuan, upaya-upaya khusus diperlukan untuk memudahkan transisi dari sekolah-ke-bekerja untuk kaum muda dan untuk mendorong akses ke peluang kerja produktif untuk perempuan.

6. Menyesuaikan kebutuhan atas kesempatan kerja produktif dengan penawaran: Sebuah fokus dalam perekonomian

Bagian di atas menjelaskan metodologi untuk memperkirakan defisit kesempatan kerja produktif dan untuk memproyeksikan kebutuhan penciptaan kesempatan kerja produktif di tahun-tahun mendatang. Dalam analisis akhir, kebutuhan ini perlu dibandingkan dengan kinerja ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja produktif dan kebijakan ekonomi. Membandingkan kebutuhan/permintaan atas kesempatan kerja produktif dengan penciptaan kesempatan kerja produktif dalam ekonomi akan membantu dalam memahami beberapa pertanyaan dan persoalan penting, seperti:

- Apakah pembangunan ekonomi berada di jalurnya dalam mencapai target-target untuk penciptaan kesempatan kerja produktif, dan target penurunan kemiskinan yang disiratkan;
- Kebutuhan yang mungkin ada untuk meningkatkan tingkat dan kualitas pertumbuhan guna mencapai target-target untuk penciptaan kesempatan kerja produktif dan penanggulangan kemiskinan;
- Apabila kebijakan ekonomi sepenuhnya sejalan dengan target-target atas penciptaan kesempatan kerja produktif dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa tabel dasar menggambarkan pembangunan ekonomi selama 5-10 tahun yang lalu dapat memberikan landasan yang cukup baik bagi analisis pertama kinerja ekonomi dari perspektif ketenagakerjaan. Ini harus mencakup:

- Tingkat pertumbuhan PDB selama 10-20 tahun yang lalu, diuraikan berdasarkan periode dan sumber pertumbuhan, mis. (i) pertumbuhan kesempatan kerja dan (ii) pertumbuhan produktivitas tenaga kerja
- Komposisi nilai tambah total sektor (PDB) dan kesempatan kerja saat ini dan di tahun-tahun terpilih sebelumnya, ditunjukkan dalam persentase;
- Kontribusi sektor-sektor ekonomi utama terhadap (i) pertumbuhan dalam nilai tambah agregat/PDB dan (ii) terhadap kesempatan kerja, ditunjukkan dalam persentase;
- Produktivitas tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor ekonomi utama saat ini dan tahun-tahun terpilih sebelumnya. Ini bisa ditunjukkan sebagai sebuah indeks, dengan rata-rata nasional tiap tahunnya = 100;
- Elastisitas kesempatan kerja dari pertumbuhan berdasarkan sektor-sektor ekonomi utama (diukur selama setidaknya periode lima tahun). Tingkat atau persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja selama periode yang sama.

Digabungkan dengan informasi mengenai perkembangan angkatan kerja, kesempatan kerja, kesempatan kerja produktif, pekerja miskin dan pengangguran, ini dapat memberikan

gambaran yang cukup cepat dan akurat atas kekuatan dan kelemahan pembangunan ekonomi dari perspektif ketenagakerjaan. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah:

- Sampai sejauh mana pembangunan ekonomi dikaitkan dengan perubahan struktural nilai tambah total/ PDB dan kesempatan kerja?
- Apa saja sektor-sektor yang paling penting terkait dengan kesempatan kerja dan nilai tambah? Sampai sejauh mana ini mengalami perubahan seiring waktu? Apakah ini juga menjadi sumber pertumbuhan utama PDB dan kesempatan kerja?
- Apakah sektor-sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi sama dengan sektor-sektor yang menciptakan kesempatan kerja terbanyak? Apakah ada sektor dimana pertumbuhan kesempatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi? Yaitu ketika pertumbuhan kesempatan kerja terjadi dengan mengorbankan produktivitas dan, kemungkinan, upah dan penghasilan.

Namun, gambaran pembangunan ekonomi juga perlu dilengkapi dengan penilaian dari perspektif inklusifitas. Sampai sejauh mana pekerjaan produktif yang diciptakan dapat diakses ke pekerja miskin dan pengangguran? Hal ini memerlukan sebuah uraian pembangunan ekonomi berdasarkan daerah dan/atau pedesaan-perkotaan, dan untuk kesempatan kerja, juga berdasarkan jenis kelamin. Informasi mengenai kebutuhan pendidikan dan keterampilan dari pekerjaan baru yang diciptakan atau perubahan dalam komposisi pendidikan dan keterampilan dari pekerja berdasarkan sektor dan jenis kelamin akan menambahkan informasi tambahan yang penting. Beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya mencakup:

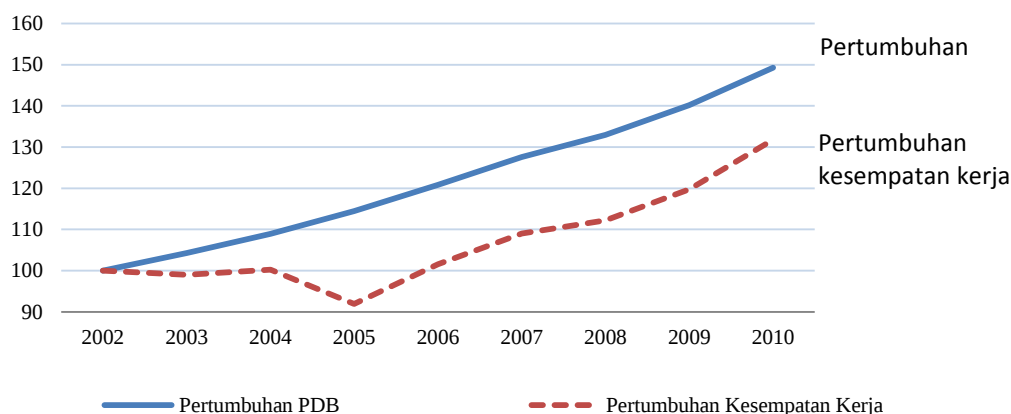
- Sejauh mana pekerjaan produktif telah diciptakan di bidang-bidang, sektor, dan pekerjaan dimana pekerja miskin dan pengangguran paling banyak ditemukan?
- Apa laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan kontribusi pertumbuhan produktivitas tersebut ke total pertumbuhan dalam sektor-sektor yang memiliki proporsi pekerja miskin yang tinggi? Sampai sejauh mana pertumbuhan produktivitas diterjemahkan menjadi upah dan penghasilan yang lebih tinggi?
- Apakah ada bukti bahwa ketidaksetaraan berbasis gender dalam hal akses ke kesempatan kerja produktif? Apabila ya, apakah ini kemungkinan disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam hal daya layak kerja/ kemampuan untuk memperoleh pekerjaan (pendidikan, tingkat keterampilan) dan/atau peluang dan akses?
- Apakah (i) pekerja miskin dan (ii) pengangguran memiliki pendidikan dan keterampilan yang diperlukan guna mengakses pekerjaan dan sektor yang menjadi pendorong utama dalam menciptakan kesempatan kerja produktif dan/atau dimana prospek-prospek terbaik untuk menciptakan kesempatan kerja produktif di masa mendatang mungkin dapat ditemukan?

Kasus Maluku, Indonesia, diberikan di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana analisis pertama dihasilkan.³⁸

³⁸ Untuk diskusi yang lebih rinci, *Conceptual and Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis* (Jenewa: Employment Sector, ILO, 2011). Akan datang.

Gambar 13 mengilustrasikan perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja di Maluku dari waktu ke waktu. Sekilas, gambaran tersebut terlihat sangat positif: perekonomian provinsi tumbuh sebesar 50 persen antara tahun 2002 dan 2010, dengan rata-rata tumbuh sekitar 5 persen per tahunnya. Komposisi pertumbuhan tampaknya positif, dengan pertumbuhan yang dicapai terutama melalui pertumbuhan kesempatan kerja, dan juga pertumbuhan produktivitas yang layak. Namun, angka agregat ini menutupi persoalan utama dalam pola-pola pertumbuhan ekonomi di Maluku, yang akan diungkapkan oleh beberapa tabel berikutnya: Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terjadi di sektor-sektor yang berbeda. Pertanian adalah sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian besar pekerjaan diciptakan di sektor jasa.

Gambar 13 PDB Provinsi dan indeks pertumbuhan kesempatan kerja, Maluku, Indonesia. 2002-2010 (2002=100)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2010. (<http://maluku.bps.go.id>)

Membandingkan komposisi PDB per sektor terhadap kesempatan kerja memberikan wawasan terhadap dinamika ekonomi dan bursa kerja di provinsi tersebut. Perekonomian provinsi didominasi oleh pertanian, walaupun terdapat pergeseran yang cukup jelas dari pertanian ke sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun, tetap saja pada tahun 2010, pertanian terhitung menyumbang hampir sepertiga PDB dan lebih dari setengah kesempatan kerja yang ada. Proporsi pertanian dalam PDB telah menurun dengan lebih lambat (sebesar 4.2 poin persentase antara tahun 2002 dan 2010) dibandingkan proporsinya dalam total kesempatan kerja, yang jatuh sebesar hampir 15 poin persentase (**Tabel 18**). Hal ini mengindikasikan peningkatan produktivitas dalam pertanian, walaupun levelnya rendah. Sektor jasa sepenuhnya mendominasi perekonomian non-pertanian, dominasi yang meningkat selama satu dasawarsa terakhir. Pada tahun 2010, jasa menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan 40 persen dari semua kesempatan kerja. Perdagangan, restoran dan jasa perhotelan menyumbang lebih dari seperempat PDB, sementara sektor layanan sosial dan swasta, yang didominasi oleh sektor layanan publik, menyumbang sedikit lebih rendah dari seperlima PDB. Sektor industri tetap tidak terlalu signifikan. Sektor manufaktur menyumbang tidak lebih dari 5 persen PDB ataupun kesempatan kerja dan tidak ada indikasi bahwa proporsi ini meningkat.

Tabel 18 Kontribusi sektor ke PDB dan kesempatan kerja, Maluku, Indonesia. Persentase

Tahun	% proporsi dalam PDB		% kesempatan kerja	
	2002	2010	2002	2010
Pertanian	35.5	31.3	66.3	51.4
Industri	7.5	7.8	8.2	9.0
Pertambangan dan penggalian/ listrik, gas dst.	1.4	1.2	0.6	0.8
Manufaktur (pengolahan)	4.9	4.8	5.2	5.0

Konstruksi	1.2	1.8	2.3	3.2
Jasa	57.0	60.9	25.5	39.6
Perdagangan, restoran	24.0	25.7	8.3	14.6
Perhubungan & komunikasi	7.9	10.9	4.9	6.2
Jasa sosial & swasta	19.5	18.9	10.6	17.9
Semua sektor	100	100	100	100

Sumber: SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2002 dan Agustus 2010 (Jakarta: Badan Pusat Statistik); *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku* (Ambon: Bank Indonesia, 2010); GDP 2010 data disediakan oleh BPS Maluku

Tabel 19 mengenai kontribusi sektor-sektor yang berbeda terhadap total pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja menunjukkan ketidakseimbangan yang menonjol dalam pola-pola struktural pembangunan.

Di Maluku, pertanian menyumbang lebih dari seperempat pertumbuhan ekonomi antara tahun 2002 dan 2010, namun pertumbuhan dalam kesempatan kerja di pertanian tidaklah sepadan dan hanya sebesar kurang dari 5 persen dari pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan selama periode tersebut. Perkembangan ini harus dianggap sebagai positif. Pertumbuhan dalam pertanian sebagian besar dihubungkan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan semacam itu penting terkait dengan tingginya jumlah pekerja miskin dalam sektor ini. Peningkatan terus menerus dalam produktivitas dan penghasilan daripada peningkatan kesempatan kerja dalam pertanian diperlukan guna mencapai dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor jasa, yang menyumbang lebih dari dua per tiga pertumbuhan antara tahun 2002 dan 2010. Perdagangan, restoran dan hotel menyumbang hampir 30 persen dari pertumbuhan PDB, sedikit meningkatkan proporsinya dalam ekonomi. Jasa sosial dan swasta, mis. terutama jasa sektor publik, dan perhubungan dan komunikasi masing-masing menyumbang 17 persen dari pertumbuhan PDB. Peran sektor jasa yang dominan semakin ditegaskan sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan tidak adanya sektor manufaktur yang kuat dan hampir tidak adanya pertumbuhan kesempatan kerja dalam pertanian, peningkatan dalam kesempatan kerja sebagian besar dibatasi ke sektor jasa, yang menyumbang 84 dari 100 pekerjaan baru yang diciptakan selama periode tersebut. Sepertiga dari total peningkatan kesempatan kerja terjadi di sektor perdagangan, restoran dan hotel sementara dua dari lima pekerjaan baru diciptakan dalam sektor jasa sosial dan swasta, yaitu yang sebagian besar didanai publik.

Tabel 19 kontribusi sektor ke pertumbuhan dalam PDB dan kesempatan kerja, Maluku, Indonesia. Persentase

2002-2010	Pertumbuhan PDB	Kesempatan kerja
Pertanian & perikanan	22.8	4.5
Industri	8.4	11.5
Pertambangan dan penggalan/listrik, gas dst.	0.9	1.3
Manufaktur	4.5	4.3
Konstruksi	3.1	6.0
Jasa	68.7	84.0
Perdagangan & restoran	29.3	34.6
Perhubungan & komunikasi	17.0	10.3
Jasa sosial dan swasta	17.7	41.0
Semua sektor	100	100

Sumber: Lihat tabel 12.

Kotak x Menghitung produktivitas tenaga kerja dan elastisitas kesempatan kerja

Produktivitas tenaga kerja (labour productivity) dihitung sebagai nilai tambah yang diciptakan per unit input tenaga kerja yang digunakan (idealnya diukur sebagai total jumlah hari atau jam kerja). PDB terhadap kesempatan kerja atau total nilai tambah yang diproduksi dalam sebuah sektor terhadap kesempatan kerja dalam sektor tersebut seringkali memberikan perkiraan yang baik terhadap produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada data penggunaan waktu. *Elastisitas kesempatan kerja (employment elasticity)* dapat diukur sebagai persentase perubahan dalam kesempatan kerja yang dihasilkan dari satu persen pertumbuhan nilai tambah/PDB. Elastisitas kesempatan kerja ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari peningkatan penggunaan tenaga kerja. Elastisitas kesempatan kerja optimal adalah spesifik situasi dan bergantung pada kebutuhan relative untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan versus pekerjaan. Sebuah analisa sifat defisit kesempatan kerja produktif dan kebutuhan penciptaan kesempatan kerja produktif (lihat Bagian 7), dapat memberikan indikasi yang baik terhadap elastisitas kesempatan kerja yang diinginkan. Elastisitas kesempatan kerja harus berkisar antara 0 dan 1. Elastisitas kesempatan kerja negatif menyiratkan bahwa pertumbuhan sejalan dengan jatuhnya kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja lebih tinggi dari 1 menyiratkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan jatuhnya produktivitas. Elastisitas kesempatan kerja perlu disagregasi berdasarkan sektor-sektor ekonomi utama karena angka agregat dapat menyamarkan perbedaan-perbedaan sektor yang penting. Dalam situasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sangat rendah atau negatif, angka elastisitas kesempatan kerja harus diterjemahkan dengan sangat berhati-hati dan mungkin tidak menghasilkan informasi yang bermakna.

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dapat dihitung sebagai persentase pertumbuhan nilai tambah pada harga konstan per pekerja (atau jam bekerja) selama periode waktu spesifik tertentu.

Pertumbuhan kesempatan kerja yang pesat dalam sektor jasa terjadi dengan mengorbankan produktivitas. Elastisitas kesempatan kerja yang sangat tinggi dalam sektor perdagangan, restoran dan hotel (2.20) dan sektor publik dan swasta (2.76) menyiratkan bahwa kesempatan kerja tumbuh dua sampai tiga kali lebih cepat dari nilai tambah dalam sektor-sektor ini. Sebagai akibatnya, produktivitas jatuh masing-masing sebesar 31 dan 35 persen pada sektor tersebut dan sebesar 22 persen pada sektor jasa secara keseluruhan, di saat bersamaan meningkat sebesar 29 persen dalam pertanian **Tabel 20**). Mempertimbangkan perbedaan yang besar dalam produktivitas antara sektor pertanian di satu sisi dan sektor jasa di sisi lain, ini dapat dianggap sebagai perkembangan yang wajar dan positif: Tenaga kerja bergeser dari sektor dengan produktivitas rendah (pertanian) ke sektor jasa dimana produktivitas jauh lebih tinggi. Sebagai akibatnya, PDB tumbuh sebagai sumber daya produktif bergerak dari bidang-bidang yang berproduktivitas rendah ke bidang berproduktivitas tinggi, penghasilan dari tenaga kerja kemungkinan meningkat dan jumlah pekerja miskin jatuh.

Tabel 20 Pertumbuhan produktivitas dan elastisitas kesempatan kerja berdasarkan sektor, Maluku, Indonesia. Persentase

2002-2010	Pertumbuhan produktivitas	Elastisitas kesempatan kerja
Pertanian	29	0.07
Industri	7	0.81
Manufaktur	15	0.57
Pertambangan, Listrik, Gas & Air	-22	2.16
Konstruksi	23	0.66
Jasa	-22	1.76
Perdagangan, hotel & restoran	-31	2.20
Perhubungan & komunikasi	24	0.63
Pembiayaan, asuransi, perumahan, bisnis	115	-0.82
Jasa publik dan swasta	-35	2.76
Semua sektor	13	0.64

Sumber: Lihat Tabel 11.

Namun, pembangunan ini sulit sekali berkelanjutan. Jelas ada batasan jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan dalam sektor publik dan pertumbuhan kesempatan kerja yang berkelanjutan di perdagangan, hotel, dan restoran yang mengorbankan produktivitas dan penghasilan tidaklah terlalu diinginkan. Sementara kekuatan utama adalah pertumbuhan nilai tambah yang pesat di sektor pertanian dan kelemahan utama struktur pertumbuhan adalah pengembangan manufaktur yang lemah, kelemahan tersebut menunjukkan posisi barang-barang dapat diimpor atau diekspor (*tradable goods*) yang lemah dalam pertumbuhan. Kesimpulan utama yang dihasilkan dari analisis adalah bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan memerlukan intensifikasi lebih lanjut dan pertanian, perikanan dan budidaya ikan air tawar yang berorientasi pasar. Ini perlu dikombinasikan dengan diversifikasi ekonomi, dengan prioritas diberikan untuk mengembangkan keterkaitan ke dan dari pertanian, untuk membangun dan memperkuat rantai nilai tambah dan mengembangkan manufaktur (pengolahan) modern.

Menindaklanjuti analisis pertama ini, sejumlah pendekatan metodologi yang berbeda dapat dilakukan guna memperoleh wawasan lebih lanjut mengenai tantangan dalam mencapai target kesempatan kerja produktif.³⁹

Analisa diagnostik ketenagakerjaan (*employment diagnostic analysis* atau EDA) dapat dilakukan guna mengidentifikasi kendala, tantangan dan peluang utama guna meningkatkan kesempatan kerja produktif secara inklusif (meluas dan berkelanjutan), sebagai basis untuk prioritas dan fokus kebijakan yang lebih tajam.⁴⁰

Beberapa model-model ekonometri, seperti Sistem Neraca Sosial Ekonomi Dinamis (*Dynamic Social Accounting Matrices* atau DySAM), telah dikembangkan guna menggali hasil-hasil ketenagakerjaan yang diinginkan dari skenario-skenario pertumbuhan yang berbeda. Model-model ini juga telah digunakan untuk menggali dampak ketenagakerjaan langsung dan tidak langsung yang diinginkan dari investasi di sektor-sektor yang berbeda atau dari perubahan dalam perdagangan.⁴¹ Terdapat juga metode untuk analisa rantai nilai tambah, yang diarahkan menuju pemahaman terhadap sifat rantai nilai tambah, kelemahan-kelemahan utama dalam rantai ini dan cakupan untuk memperkuat rantai-rantai ini dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan kesempatan kerja melalui efek pengganda yang lebih kuat dalam ekonomi.⁴²

³⁹ Untuk daftar yang lebih komprehensif lihat Lampiran *Conceptual and Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis* (Jenewa: Sektor Ketenagakerjaan, ILO). Yang akan datang, atau *Guide for the formulation and implementation of national employment policies* (Jenewa: Sektor Ketenagakerjaan, ILO, 2011). Draf.

⁴⁰ *Conceptual and Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis* (Jenewa: Sektor Ketenagakerjaan, ILO). Akan datang.

⁴¹ Lihat Alarcon et.al. *Concept, Methodology and Simulation Outcomes. The case of Indonesia and Mozambique*, Employment Working Paper No 88 (Jenewa: ILO, 2011); El Achkar Hilal, *The Mongolia Projection Model* (Jenewa: ILO, 2011). Draf.

⁴² Untuk informasi berbasis web, laman Job Creation and Enterprise Development Department, Sektor Ketenagakerjaan, di www.ilo.org.

Daftar Pustaka

Berger, S.; Harasty, C. 2002. *World and Regional Employment Prospects: Halving the World's Working Poor by 2010* (Jenewa: ILO, 2002)

International Labour Office (ILO). 2009. *Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators* (Jenewa: ILO, 2009)

Kapsos, S. 2004. *Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015?* (Jenewa: ILO, 2004).

Majid, N. 2001. *The size of the working poor population in developing countries* (Jenewa: ILO, 2001)

Sparreboom T. and Albee A. (eds.). 2011. *Towards Decent Work in Sub-Saharan Africa: Monitoring MDG Employment Indicators* (Jenewa: ILO, 2011).

www.ilo.org/kilm, khususnya tabel 18a dan 18b

www.laborsta.org

Proyeksi angkatan kerja

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html

Lampiran: Pekerja miskin berdasarkan negara (KILM)

Negara	Tahun	Tingkat Kemiskinan, 1.25 USD	Tingkat Kemiskinan 2.00 USD	Pekerja miskin di level US\$1.25 per hari ('000)	Pekerja miskin di level US\$2 per hari ('000)	Pekerja miskin di level US\$1.25 per hari (% dari total kesempatan kerja)	Pekerja miskin di level US\$2 per hari (%dari total kesempatan kerja)	Rasio pekerja miskin – tingkat kemiskinan, 1.25 USD	Rasio pekerja miskin – tingkat kemiskinan, 2,00 USD	Tipe sumber (kode)
Algeria	1995	6.8	23.6			3.9	15.9	0.57	0.67	ILO
Angola	2000	54.3	70.2			50.1	65.1	0.92	0.93	ILO
Armenia	1996	17.5	38.9			9.7	29.9	0.55	0.77	ILO
Armenia	1999	18.0	48.8			9.8	37.4	0.54	0.77	ILO
Armenia	2001	11.0	37.6			5.9	28.7	0.54	0.76	ILO
Armenia	2002	15.0	46.7			8.0	35.3	0.53	0.76	ILO
Armenia	2003	10.6	43.4			5.6	32.6	0.53	0.75	ILO
Armenia	2004			45.3	278.0	3.9	24.0			LSS
Armenia	2008	1.3	12.4			0.7	9.0	0.54	0.73	ILO
Azerbaijan	1995	16.3	39.1			12.5	34.0	0.77	0.87	ILO
Azerbaijan	2001	6.3	27.1			4.7	23.0	0.75	0.85	ILO
Azerbaijan	2008	1.0	7.7			0.7	6.1	0.70	0.79	ILO
Bangladesh	1992	52.7	85.7			55.9	89.8	1.06	1.05	ILO
Bangladesh	1996	49.6	79.4			51.4	81.8	1.04	1.03	ILO
Bangladesh	2000	56.1	83.1	24 570.4	36 569.6	56.1	83.5	1.00	1.00	IES
Bangladesh	2005	50.5	80.3	22 522.1	36 016.3	50.1	80.1	0.99	1.00	IES
Belize	1995	14.0	23.6			10.7	18.3	0.76	0.78	ILO
Belize	1999	12.4	24.5			9.4	19.1	0.76	0.78	ILO
Benin	2003	47.3	75.3	1 173.9	1 921.3	43.6	71.3	0.92	0.95	CWIQ
Bhutan	2003	26.2	49.5	66.8	126.4	26.9	50.8	1.03	1.03	LSS
Bolivia	1999	26.3	36.1			25.3	33.9	0.96	0.94	ILO

Bolivia	2002	22.8	34.2	777.0	1 137.7	21.9	32.0	0.96	0.94	HS
Bolivia	2005	19.6	30.3			18.6	28.2	0.95	0.93	ILO
Bolivia	2007	13.6	25.1			12.9	23.4	0.95	0.93	ILO
Botswana	1994	31.2	49.4			24.0	38.7	0.77	0.78	ILO
Brasil	1992	13.3	24.4			7.3	14.8	0.55	0.61	ILO
Brasil	1993	13.0	24.7			7.1	15.0	0.55	0.61	ILO
Brasil	1995	10.5	21.9			5.7	13.2	0.54	0.60	ILO
Brasil	1996	11.4	22.6			6.1	13.6	0.54	0.60	ILO
Brasil	1997	12.0	23.3			6.4	14.0	0.53	0.60	ILO
Brasil	1998	11.0	22.5			5.9	13.5	0.54	0.60	ILO
Brasil	1999	11.2	23.0			5.9	13.8	0.53	0.60	ILO
Brasil	2001	11.0	22.3			5.8	13.4	0.53	0.60	ILO
Brasil	2002	9.8	21.3			5.2	12.8	0.53	0.60	ILO
Brasil	2003	10.4	21.7			5.5	13.0	0.53	0.60	ILO
Brasil	2004	11.7	20.9			6.2	12.5	0.53	0.60	ILO
Brasil	2005	7.8	18.3			4.1	11.0	0.53	0.60	ILO
Brasil	2007			2 356.5	6 490.1	2.7	7.5			HS
Brasil	2008	4.3	10.4			2.2	6.2	0.51	0.60	ILO
Brasil	2009	3.8	9.9			2.0	5.9	0.53	0.60	ILO
Burkina Faso	1994	71.2	85.8			71.7	87.8	1.01	1.02	ILO
Burkina Faso	1998	70.0	87.6			69.6	88.5	0.99	1.01	ILO
Burkina Faso	2003	56.5	81.2	2 818.8	4 120.9	55.5	81.1	0.98	1.00	CWIIQ
Burundi	1992	84.2	95.2			80.7	92.7	0.96	0.97	ILO
Burundi	1998	86.4	95.4	2 230.2	2 495.6	85.3	95.4	0.99	1.00	LSS
Burundi	2006	81.3	93.4			75.8	89.8	0.93	0.96	ILO
Kamboja	1994	48.6	77.8			50.5	82.9	1.04	1.07	ILO
Kamboja	2004	40.2	68.2	2 439.6	4 346.3	37.0	66.0	0.92	0.97	SES
Kamboja	2007	28.3	56.4			25.1	53.1	0.89	0.94	ILO

Kamerun	1996	51.5	74.4			49.4	72.6	0.96	0.98	ILO
Kamerun	2001	32.8	57.7	1 610.7	2 893.3	31.0	55.8	0.95	0.97	HS
Cape Verde	2001			21.8	45.3	16.0	33.3			IES
CAR	1992	83.2	91.0			78.6	88.7	0.94	0.97	ILO
CAR	2003	62.4	81.9			58.7	79.8	0.94	0.97	ILO
CAR	2008	62.8	80.1			58.6	77.5	0.93	0.97	ILO
Chad	2003	61.9	83.3			58.7	80.4	0.95	0.97	ILO
Chili	1994	2.6	10.4			1.9	8.1	0.73	0.78	ILO
Chili	1996	0.4	7.8			0.0	6.0	0.00	0.77	ILO
Chili	1998	0.7	7.5			0.0	5.7	0.00	0.76	ILO
Chili	2000	1.0	6.0			0.7	4.5	0.70	0.75	ILO
Chili	2003	1.1	5.3			0.8	4.1	0.73	0.77	ILO
Chili	2006	0.2	2.4			0.0	1.8	0.00	0.75	ILO
Chili	2009	0.0	0.0			0.0	0.0			ILO
Kolombia	1995	11.7	24.1			9.2	19.1	0.79	0.79	ILO
Kolombia	1996	13.8	26.0			10.7	20.6	0.78	0.79	ILO
Kolombia	1998	15.9	28.4			12.5	22.7	0.79	0.80	ILO
Kolombia	1999	17.2	30.2			13.6	24.4	0.79	0.81	ILO
Kolombia	2000	16.6	29.4			13.2	23.8	0.80	0.81	ILO
Kolombia	2003	15.4	26.3	2 168.5	3 801.2	12.2	21.3	0.79	0.81	LSS
Kolombia	2006	16.0	27.9			12.6	22.6	0.79	0.81	ILO
Comoros	2004	46.1	65.0			42.0	61.2	0.91	0.94	ILO
Kongo	2005	54.1	74.4	632.6	879.6	52.4	72.9	0.97	0.98	CWIQ
Kongo, DR	2006	69.2	79.5			59.7	82.2	0.86	1.03	ILO
Kosta Rika	1992	8.7	18.1			6.4	14.2	0.74	0.78	ILO
Kosta Rika	1993	7.9	17.2			5.9	13.5	0.75	0.78	ILO
Kosta Rika	1996	7.1	15.6			5.2	12.2	0.73	0.78	ILO
Kosta Rika	1997	4.5	12.2			3.3	9.6	0.73	0.79	ILO

Kosta Rika	1998	4.0	11.1			2.9	8.7	0.73	0.78	ILO
Kosta Rika	2000	4.4	11.5			3.2	9.0	0.73	0.78	ILO
Kosta Rika	2001	3.5	10.0			2.6	7.9	0.74	0.79	ILO
Kosta Rika	2003	4.8	11.3			3.5	8.9	0.73	0.79	ILO
Kosta Rika	2005	2.4	8.6			1.7	6.7	0.71	0.78	ILO
Kosta Rika	2009	0.7	5.4			0.0	4.2	0.00	0.78	ILO
Côte d'Ivoire	1993	17.8	43.5			18.0	42.6	1.01	0.98	ILO
Côte d'Ivoire	1995	21.1	47.9			21.3	46.9	1.01	0.98	ILO
Côte d'Ivoire	1998	24.1	49.1			23.9	47.7	0.99	0.97	ILO
Côte d'Ivoire	2002	23.3	46.8	1 453.1	2 847.6	23.3	45.7	1.00	0.98	LSS
Côte d'Ivoire	2008	23.8	46.3			23.8	45.5	1.00	0.98	ILO
Djibouti	1996	4.7	15.5	1.1	3.6	2.6	8.5	0.55	0.55	HS
Republik Dominika	1992	4.6	14.5			3.5	11.7	0.76	0.81	ILO
Republik Dominika	1996	5.9	15.7			4.5	12.7	0.76	0.81	ILO
Republik Dominika	1997	6.8	15.5			5.2	12.5	0.76	0.81	ILO
Republik Dominika	2000	4.4	12.4			3.3	9.9	0.75	0.80	ILO
Republik Dominika	2003	6.1	16.3			4.6	13.0	0.75	0.80	ILO
Republik Dominika	2005	5.0	15.1			3.7	11.9	0.74	0.79	ILO
Republik Dominika	2006	4.0	13.5			2.9	10.7	0.73	0.79	ILO
Republik Dominika	2007	4.3	13.6			3.1	10.7	0.72	0.79	ILO
Timor Timur	2001	52.9	77.5	117.3	182.5	47.0	73.1	0.89	0.94	HS
Timor Timur	2007	37.4	72.8			32.6	68.2	0.87	0.94	ILO
Ekuador	1994	15.9	28.1	683.7	1 231.4	14.2	25.5	0.89	0.91	LSS
Ekuador	1998	14.5	27.7			12.9	25.3	0.89	0.91	ILO
Ekuador	2003	11.5	23.9			10.1	21.7	0.88	0.91	ILO
Ekuador	2005	9.8	20.4			8.6	18.4	0.88	0.90	ILO
Ekuador	2007	4.7	12.8			4.1	11.5	0.87	0.90	ILO
Ekuador	2009	4.4	13.5			3.8	12.1	0.86	0.90	ILO

Mesir	1991	4.5	27.6			3.1	21.5	0.69	0.78	ILO
Mesir	1996	2.5	26.3			1.7	20.5	0.68	0.78	ILO
Mesir	2000	1.8	19.3			1.2	15.1	0.67	0.78	ILO
Mesir	2005	2.0	18.4			1.3	14.4	0.65	0.78	ILO
El Salvador	1995	13.2	25.4			10.3	20.6	0.78	0.81	ILO
El Salvador	1996	15.0	27.8			11.6	22.4	0.77	0.81	ILO
El Salvador	1997	13.1	25.8			10.1	20.7	0.77	0.80	ILO
El Salvador	1998	13.5	25.4			10.4	20.5	0.77	0.81	ILO
El Salvador	2000	12.6	22.0			9.7	17.6	0.77	0.80	ILO
El Salvador	2002	13.9	23.4			10.6	18.7	0.76	0.80	ILO
El Salvador	2003	14.7	25.2			11.2	20.2	0.76	0.80	ILO
El Salvador	2005	11.2	20.5			8.4	16.3	0.75	0.80	ILO
El Salvador	2008	5.1	15.2			3.8	12.1	0.75	0.80	ILO
Equatorial Guinea	2005					3.4	14.0			ILO
Eritrea	2005					35.3	73.1			ILO
Ethiopia	1995	60.5	84.6			55.1	81.3	0.91	0.96	ILO
Ethiopia	1999	55.6	86.4	10 105.5	16 580.5	50.9	83.5	0.92	0.97	IES
Ethiopia	2004	39.0	77.5	8 706.7	18 233.0	34.9	73.1	0.89	0.94	IES
Fiji	2005					18.5	49.7			ILO
Gabon	2005	4.8	19.6	12.7	50.5	3.6	14.2	0.75	0.72	CWIQ
Gambia	1998	66.7	82.0			63.5	79.4	0.95	0.97	ILO
Gambia	2003	34.3	56.7			32.4	54.5	0.94	0.96	ILO
Georgia	2002	15.7	33.9			11.4	28.9	0.73	0.85	ILO
Georgia	2003	17.7	36.7			12.7	30.9	0.72	0.84	ILO
Georgia	2005	14.1	30.2			10.0	25.3	0.71	0.84	ILO
Georgia	2008	15.3	32.2			10.7	26.8	0.70	0.83	ILO
Ghana	1992	51.1	77.6			46.0	72.5	0.90	0.93	ILO
Ghana	1998	39.1	63.3	2 178.3	3 675.7	34.6	58.3	0.88	0.92	LSS

Ghana	2006	30.0	53.6			25.8	48.3	0.86	0.90	ILO
Guatemala	1998	16.4	30.3			12.0	23.7	0.73	0.78	ILO
Guatemala	2000	13.8	27.5	412.7	876.9	10.1	21.5	0.73	0.78	LSS
Guatemala	2002	16.9	29.8			12.3	23.2	0.73	0.78	ILO
Guinea	1991	92.6	98.4			96.6	98.4	1.04	1.00	ILO
Guinea	2003	70.1	87.2	2 216.6	2 711.1	72.2	88.3	1.03	1.01	HS
Guinea	2007	43.3	69.6			44.4	70.2	1.03	1.01	ILO
Guinea-Bissau	1993	52.1	75.7			48.9	73.4	0.94	0.97	ILO
Guinea-Bissau	2002	48.8	77.9			46.2	76.6	0.95	0.98	ILO
Guyana	1993	6.9	17.1			5.6	14.8	0.81	0.87	ILO
Guyana	1998	8.7	18.0			7.0	15.4	0.80	0.86	ILO
Haiti	2001	54.9	72.1			48.5	66.5	0.88	0.92	ILO
Honduras	1992	33.3	50.8			28.5	44.1	0.86	0.87	ILO
Honduras	1994	28.3	45.4			24.1	39.4	0.85	0.87	ILO
Honduras	1997	16.0	29.4			13.6	25.5	0.85	0.87	ILO
Honduras	1999	14.4	26.8			12.2	23.3	0.85	0.87	ILO
Honduras	2003	18.1	33.4			14.8	28.3	0.82	0.85	ILO
Honduras	2005	22.2	34.8			18.0	29.2	0.81	0.84	ILO
Honduras	2007	23.3	35.4			18.6	29.6	0.80	0.84	ILO
India	1994	49.4	81.7			49.1	83.9	0.99	1.03	ILO
India	2005	41.6	75.6	142	270	39.2	74.5	0.94	0.99	HS
				467.7	578.8					
Indonesia	1993	54.4	84.6			52.6	83.8	0.97	0.99	ILO
Indonesia	1996	43.4	77.0			41.1	75.1	0.95	0.98	ILO
Indonesia	1999	47.7	81.5			45.0	79.8	0.94	0.98	ILO
Indonesia	2002	29.3	66.9	24 922.9	59 352.4	27.4	65.2	0.94	0.97	SES
Indonesia	2005	21.4	53.8			19.8	52.0	0.93	0.97	ILO
Iran	1994	1.4	8.2			0.9	5.7	0.64	0.70	ILO
Iran	1998	1.3	8.3			0.8	6.0	0.62	0.72	ILO

Iran	2005	1.5	8.0			0.9	6.2	0.60	0.77	ILO
Irak	2007	4.0	25.3			2.2	16.6	0.55	0.66	ILO
Jamaika	1993	3.8	14.4			2.9	11.5	0.76	0.80	ILO
Jamaika	1996	1.7	8.6			1.3	6.9	0.76	0.80	ILO
Jamaika	1999	1.3	6.2			0.9	4.9	0.69	0.79	ILO
Jamaika	2002	0.4	8.7			0.0	6.9	0.00	0.79	ILO
Jamaika	2004	0.2	5.8			0.0	4.6	0.00	0.79	ILO
Jordan	1992	2.8	14.9			2.2	10.7	0.79	0.72	ILO
Jordan	1997	1.5	11.5			1.4	9.4	0.93	0.82	ILO
Jordan	2003	1.2	11.0	10.1	87.4	1.0	9.0	0.83	0.82	IES
Jordan	2006	0.4	3.5			0.0	2.8	0.00	0.80	ILO
Kazakhstan	1993	4.2	17.6			2.7	13.2	0.64	0.75	ILO
Kazakhstan	1996	5.0	18.7			3.2	14.2	0.64	0.76	ILO
Kazakhstan	2002	5.2	21.5			3.2	15.9	0.62	0.74	ILO
Kazakhstan	2003	3.1	17.2	117.1	770.4	1.9	12.6	0.61	0.73	HS
Kazakhstan	2007	0.2	1.5			0.0	1.1	0.00	0.73	ILO
Kenya	1992	38.4	59.3			31.5	51.3	0.82	0.87	ILO
Kenya	1994	28.5	53.6			23.2	46.2	0.81	0.86	ILO
Kenya	1997	19.6	42.7			15.7	36.5	0.80	0.85	ILO
Kenya	2005	19.7	39.9	1 948.1	4 242.9	15.4	33.6	0.78	0.84	IES
Kyrgyzstan	1993	18.6	30.1			14.8	26.5	0.80	0.88	ILO
Kyrgyzstan	1998	31.8	60.7			25.4	54.1	0.80	0.89	ILO
Kyrgyzstan	2002	34.0	66.6			26.5	58.8	0.78	0.88	ILO
Kyrgyzstan	2004	21.8	51.9			16.9	45.4	0.78	0.87	ILO
Kyrgyzstan	2007	1.9	29.4			1.5	25.5	0.79	0.87	ILO
Lao PDR	1992	55.7	84.8			57.1	89.1	1.03	1.05	ILO
Lao PDR	1997	49.3	79.9			49.9	82.8	1.01	1.04	ILO
Lao PDR	2002	44.0	76.8			43.2	77.9	0.98	1.01	ILO

Lao PDR	2008	33.9	66.0			31.5	64.0	0.93	0.97	ILO
Lesotho	1993	56.4	70.9			42.6	56.6	0.76	0.80	ILO
Lesotho	1994	46.2	59.7			35.4	48.5	0.77	0.81	ILO
Lesotho	2003	43.4	62.2	154.6	236.5	33.5	51.2	0.77	0.82	IES
Liberia	2007	83.7	94.8	907.1	1 022.3	83.8	94.4	1.00	1.00	CWIQ
Macedonia, FYROM	1998	0.0	3.9			0.0	3.1		0.79	ILO
Macedonia, FYROM	2000	4.3	11.5			2.7	9.2	0.63	0.80	ILO
Macedonia, FYROM	2002	0.6	3.1			0.0	2.5	0.00	0.81	ILO
Macedonia, FYROM	2003	0.5	3.2			0.0	2.6	0.00	0.81	ILO
Macedonia, FYROM	2008	0.3	4.3			0.0	3.4	0.00	0.79	ILO
Madagascar	1993	72.5	88.4			68.2	86.6	0.94	0.98	ILO
Madagascar	1997	72.0	89.4			68.2	88.1	0.95	0.99	ILO
Madagascar	1999	82.3	93.1			78.2	91.9	0.95	0.99	ILO
Madagascar	2001	76.3	88.7			72.3	87.3	0.95	0.98	ILO
Madagascar	2005	67.8	89.6	5 525.7	7 598.8	64.1	88.1	0.95	0.98	HS
Malawi	1998	83.1	93.5			78.4	91.2	0.94	0.98	ILO
Malawi	2004	73.9	90.4	3 990.1	5 038.7	70.7	89.3	0.96	0.99	HS
Malaysia	1992	1.6	11.2			1.4	10.0	0.87	0.89	ILO
Malaysia	1995	2.1	11.0			1.7	9.6	0.81	0.87	ILO
Malaysia	1997	0.5	6.8			0.0	6.0	0.00	0.88	ILO
Malaysia	2004	0.5	7.8			0.0	6.7	0.00	0.86	ILO
Malaysia	2009	0.0	2.3			0.0	1.9		0.83	ILO
Maladewa	1998	28.2	40.6			26.1	37.5	0.93	0.92	ILO
Maladewa	2004	1.5	12.2			1.3	11.2	0.87	0.92	ILO
Mali	1994	86.1	93.9			88.9	98.3	1.03	1.05	ILO
Mali	2001	61.2	82.0			61.6	83.6	1.01	1.02	ILO
Mali	2006	51.4	77.1	2 313.4	3 504.0	51.3	77.7	1.00	1.01	HS
Mauritania	1993	42.8	68.6			35.3	58.0	0.82	0.85	ILO

Mauritania	1996	23.4	48.3			19.2	40.8	0.82	0.84	ILO
Mauritania	2000	21.2	44.1			17.4	37.7	0.82	0.85	ILO
Meksiko	1992	4.5	14.6			3.3	11.1	0.73	0.76	ILO
Meksiko	1994	3.3	13.5			2.4	10.2	0.73	0.76	ILO
Meksiko	1995	7.7	17.8			5.6	13.5	0.73	0.76	ILO
Meksiko	1996	7.0	18.6			5.1	14.2	0.73	0.76	ILO
Meksiko	1998	8.0	19.1			5.8	14.6	0.73	0.76	ILO
Meksiko	2000	4.8	13.7			3.5	10.4	0.73	0.76	ILO
Meksiko	2002	3.7	13.1			2.7	10.0	0.73	0.76	ILO
Meksiko	2004	2.4	11.0	727.8	3 534.8	1.7	8.4	0.71	0.76	IES
Meksiko	2006	0.7	4.8			0.0	3.6	0.00	0.75	ILO
Meksiko	2008	1.8	8.6			1.3	6.5	0.72	0.76	ILO
Moldova	1992	17.0	39.1			12.6	33.2	0.74	0.85	ILO
Moldova	1997	15.1	36.8			11.4	32.1	0.75	0.87	ILO
Moldova	1999	44.2	73.4			33.5	64.8	0.76	0.88	ILO
Moldova	2001	33.0	62.9			24.8	55.3	0.75	0.88	ILO
Moldova	2002	17.1	40.3			12.7	35.3	0.74	0.88	ILO
Moldova	2004	8.1	28.9			6.0	25.5	0.74	0.88	ILO
Moldova	2008	1.9	12.5			1.3	10.9	0.68	0.87	ILO
Mongolia	1995	18.8	43.5			14.3	36.7	0.76	0.84	ILO
Mongolia	2002	15.5	38.8	99.6	282.9	11.3	32.0	0.73	0.82	LSS
Moroko	1998	6.8	24.4	489.4	2 005.1	5.5	22.7	0.81	0.93	IES
Moroko	2001	6.3	24.3			5.0	22.6	0.79	0.93	ILO
Moroko	2007	2.5	14.0			2.0	13.0	0.80	0.93	ILO
Mozambique	1997	81.3	92.9			80.9	94.5	1.00	1.02	ILO
Mozambique	2003	74.7	90.0	5 851.4	7 193.1	73.6	90.4	0.99	1.00	IES
Mozambique	2008	59.6	81.8			58.0	81.1	0.97	0.99	ILO
Namibia	1993	49.1	62.2			36.4	47.4	0.74	0.76	ILO

Nepal	1996	68.4	88.1			63.9	85.7	0.93	0.97	ILO
Nepal	2003	55.1	77.6	6 390.0	9 401.0	50.4	74.1	0.91	0.95	LSS
Nicaragua	1993	32.5	49.2			27.3	42.9	0.84	0.87	ILO
Nicaragua	1998	22.3	38.5	289.5	526.3	18.1	32.8	0.81	0.85	LSS
Nicaragua	2001	19.4	37.5	290.1	592.2	15.8	32.2	0.81	0.86	LSS
Nicaragua	2005	15.8	31.8	254.6	546.6	12.8	27.4	0.81	0.86	LSS
Niger	1993	72.8	91.1			66.9	87.3	0.92	0.96	ILO
Niger	1994	78.2	91.5			71.9	87.8	0.92	0.96	ILO
Niger	2005	65.9	85.6	2 078.3	2 806.8	61.7	83.3	0.94	0.97	CWIIQ
Niger	2007	43.1	75.9			40.3	73.7	0.94	0.97	ILO
Nigeria	1992	49.2	69.7			45.2	66.4	0.92	0.95	ILO
Nigeria	1996	68.5	86.4			62.8	82.5	0.92	0.95	ILO
Nigeria	2004	64.4	83.9	24 358.3	33 135.1	58.2	79.2	0.90	0.94	LSS
Pakistan	1991	64.7	88.2			57.4	83.6	0.89	0.95	ILO
Pakistan	1997	48.1	83.2			42.3	78.4	0.88	0.94	ILO
Pakistan	2002	35.9	73.9			31.1	69.6	0.87	0.94	ILO
Pakistan	2005	22.6	60.3	6 821.6	19 964.3	19.3	56.5	0.85	0.94	LSS
Pakistan	2006	22.6	60.9			19.2	57.0	0.85	0.94	ILO
Panama	1991	16.9	26.8			11.1	19.3	0.66	0.72	ILO
Panama	1995	11.5	19.7			7.6	14.4	0.66	0.73	ILO
Panama	1996	12.4	21.2			8.2	15.4	0.66	0.73	ILO
Panama	1997	7.2	15.2	48.5	112.9	4.8	11.1	0.67	0.73	LSS
Panama	2000	11.5	20.0			7.6	14.5	0.66	0.73	ILO
Panama	2001	13.8	22.7			9.1	16.5	0.66	0.73	ILO
Panama	2002	10.8	20.0			7.1	14.6	0.66	0.73	ILO
Panama	2004	9.2	18.0			6.0	13.1	0.65	0.73	ILO
Panama	2006	9.5	17.8			6.2	12.9	0.65	0.72	ILO
Panama	2009	2.4	9.5			1.5	6.8	0.63	0.72	ILO

Papua New Guinea	1996	35.6	57.4			34.0	56.3	0.96	0.98	ILO
Paraguay	1995	12.7	21.8			10.3	18.3	0.81	0.84	ILO
Paraguay	1998	19.6	30.2			15.8	25.3	0.81	0.84	ILO
Paraguay	1999	14.3	23.6			11.5	19.7	0.80	0.83	ILO
Paraguay	2002	17.1	27.9			13.7	23.3	0.80	0.84	ILO
Paraguay	2005	9.0	18.5			7.2	15.5	0.80	0.84	ILO
Paraguay	2007	6.8	15.2			5.4	12.7	0.79	0.84	ILO
Paraguay	2008	5.1	13.2			4.0	11.0	0.78	0.83	ILO
Peru	2001	15.1	27.9			13.3	26.2	0.88	0.94	ILO
Peru	2002	12.6	24.4			11.1	22.9	0.88	0.94	ILO
Peru	2003			824.6	2 088.1	6.4	16.1			HS
Peru	2005	8.2	19.4			7.1	18.1	0.87	0.93	ILO
Peru	2006	7.9	18.5			6.9	17.2	0.87	0.93	ILO
Peru	2009	5.9	14.7			5.1	13.5	0.86	0.92	ILO
Filipina	1991	30.7	55.4			26.8	51.7	0.87	0.93	ILO
Filipina	1994	28.1	52.6			24.5	49.0	0.87	0.93	ILO
Filipina	1997	21.6	43.8			18.6	40.5	0.86	0.92	ILO
Filipina	2000	22.5	44.8			19.2	41.3	0.85	0.92	ILO
Filipina	2003	22.0	43.8	5 529.4	11 864.2	18.7	40.1	0.85	0.92	LFS/IES
Filipina	2006	22.6	45.0			19.0	40.9	0.84	0.91	ILO
Federasi Rusia	1993	1.5	8.3			1.0	6.5	0.67	0.78	ILO
Rwanda	2000	76.6	90.3			75.5	90.9	0.99	1.01	ILO
Rwanda	2005	76.8	89.6			72.8	87.4	0.95	0.98	ILO
Senegal	1991	65.8	81.5			69.4	84.0	1.05	1.03	ILO
Senegal	1994	54.1	79.4			56.9	81.8	1.05	1.03	ILO
Senegal	2001	44.2	71.3	1 282.9	2 035.6	45.8	72.7	1.04	1.02	HS
Senegal	2005	33.5	60.3			34.4	61.1	1.03	1.01	ILO
Sierra Leone	2003	53.4	76.1	952.5	1 375.0	54.1	78.2	1.01	1.03	HS

Afrika Selatan	1993	24.3	41.1			11.3	21.2	0.47	0.52	ILO
Afrika Selatan	1995	21.4	39.9			10.6	21.8	0.50	0.55	ILO
Afrika Selatan	2000	26.2	42.9	1 492.8	2 772.9	12.5	23.2	0.48	0.54	IES
Afrika Selatan	2006	17.4	35.7			8.3	19.7	0.48	0.55	ILO
Sri Lanka	1991	15.0	49.5			13.2	46.5	0.88	0.94	ILO
Sri Lanka	1996	16.3	46.7			14.0	43.2	0.86	0.93	ILO
Sri Lanka	2002	14.0	39.7	716.1	2 221.3	11.7	36.2	0.84	0.91	IES
Sri Lanka	2007	7.0	29.1			5.8	26.0	0.83	0.89	ILO
Suriname	1999	15.5	27.2			11.2	21.5	0.72	0.79	ILO
Swaziland	1995	78.6	89.3			64.9	73.6	0.83	0.82	ILO
Swaziland	2001	62.9	81.0			50.6	66.2	0.80	0.82	ILO
Syrian Arab Republic	2004	1.7	16.8			1.1	12.9	0.65	0.77	ILO
Tajikistan	1999	44.0	78.5			39.6	74.8	0.90	0.95	ILO
Tajikistan	2003	36.3	68.8	685.8	1 363.3	33.0	65.5	0.91	0.95	LSS
Tajikistan	2004	21.5	50.8			19.5	48.3	0.91	0.95	ILO
Tanzania, United Republic of	1992	72.6	91.3			70.0	89.7	0.96	0.98	ILO
Tanzania, United Republic of	2000	88.5	96.6			84.4	94.1	0.95	0.97	ILO
Tanzania, United Republic of	2007	67.9	87.9			64.0	84.7	0.94	0.96	ILO
Thailand	1992	5.5	25.5			4.4	23.2	0.80	0.91	ILO
Thailand	1996	1.9	17.4			1.5	15.5	0.79	0.89	ILO
Thailand	1998	0.0	16.6			0.0	14.9		0.90	ILO
Thailand	1999	1.5	20.0			1.2	17.8	0.80	0.89	ILO
Thailand	2000	1.4	20.6			1.1	18.3	0.79	0.89	ILO
Thailand	2002	0.7	15.1	168.3	4 196.8	0.5	13.3	0.71	0.88	SES
Thailand	2004	0.4	11.5			0.0	10.1	0.00	0.88	ILO
Togo	2006	38.7	69.3	860.6	1 605.5	35.8	66.7	0.93	0.96	HS
Trinidad and Tobago	1992	4.2	13.5			2.8	9.8	0.67	0.73	ILO

Tunisia	1995	6.5	20.4			4.2	15.6	0.65	0.76	ILO
Tunisia	2000	2.6	12.8			1.6	9.9	0.62	0.77	ILO
Turki	1994	2.1	9.8			1.2	7.2	0.57	0.73	ILO
Turki	2002	2.0	9.6	243.8	1 605.1	1.0	6.9	0.50	0.72	IES
Turki	2004	3.5	12.2			1.8	8.6	0.51	0.70	ILO
Turki	2005	2.7	9.0			1.4	6.4	0.52	0.71	ILO
Turkmenistan	1993	63.5	85.7			47.9	71.5	0.75	0.83	ILO
Turkmenistan	1998	24.8	49.6			19.0	42.9	0.77	0.86	ILO
Uganda	1992	70.0	88.6			66.0	87.9	0.94	0.99	ILO
Uganda	1996	64.4	85.9			60.4	84.5	0.94	0.98	ILO
Uganda	1999	60.5	82.7			56.6	81.0	0.94	0.98	ILO
Uganda	2002	57.4	79.8			53.5	77.9	0.93	0.98	ILO
Uganda	2005	51.5	75.6	5 320.9	8 165.3	47.8	73.4	0.93	0.97	HS
Uganda	2010	37.7	64.5			34.5	61.7	0.92	0.96	ILO
Uruguay	2006	0.0	4.2			0.0	3.3		0.79	ILO
Viet Nam	2002	35.6	6.7			38.8	69.2	1.09	10.33	ILO
Viet Nam	2004	25.0	3.6	10 334.5	23 600.9	22.7	51.8	0.91	14.39	LSS
Viet Nam	2006	20.4	3.9	9 528.0	22 493.0	20.2	47.7	0.99	12.23	LSS
Viet Nam	2008	18.7	3.3			12.0	37.3	0.64	11.30	ILO
Yemen	1998	42.5	32.3			8.1	25.0	0.19	0.77	ILO
Yemen	2005	40.1	20.7			11.2	33.5	0.28	1.62	ILO
Zambia	1991	88.0	48.6			54.7	69.1	0.62	1.42	ILO
Zambia	1993	92.2	44.9			58.3	73.7	0.63	1.64	ILO
Zambia	1996	84.2	40.5			56.5	75.2	0.67	1.86	ILO
Zambia	1998	83.0	39.5			51.2	70.4	0.62	1.78	ILO
Zambia	2003	74.3	52.2			59.2	79.6	0.80	1.52	ILO
Zambia	2004	77.3	29.1			58.9	76.1	0.76	2.62	ILO